

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA**

PDRB Kabupaten Blora 2014

ISBN : 978-602-71146-8-5
Katalog BPS : 9200.3316
Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman : 128 halaman
Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Penyunting :

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

Perancang Sampul :

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

Diterbitkan :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora Tahun 2014 dapat disajikan. Publikasi PDRB 2014 tersebut merupakan publikasi PDRB pertama yang menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun dasar 2010. Publikasi ini menyajikan series data statistik perekonomian yang secara umum dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir.

Ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara publikasi PDRB tahun 2014 ini dibandingkan dengan publikasi PDRB sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penerapan SNA 2008 yang merubah wajah PDRB tersebut karena adanya perubahan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Publikasi ini akan terbit secara berkesinambungan, sehingga data dan informasi yang terdapat di dalamnya diharapkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kabupaten Blora dari waktu ke waktu.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan publikasi yang akan datang.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Blora, Agustus 2015

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Blora

FENNY SUSANTO, S.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	Vii
Daftar Tabel Pokok	vii
I PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1
1.2 Siklus Kegiatan Ekonomi	8
1.3 Pengelompokan Sektor Lapangan Usaha	9
1.4 Analisa dan Kegunaan Data PDRB	14
1.5 Sistematika Penulisan	17
II KONSEP DAN DEFINISI	
2.1 Domestik dan Regional	18
2.2 Produk Domestik dan Produk Regional	18
2.3 Agregat PDRB atas dasar harga berlaku	20
2.4 Agregat PDRB atas dasar harga konstan	24
III METODE PENGHITUNGAN PDRB	
3.1 Metode Pendekatan Produksi	32
3.2 Pendekatan Pendapatan	34
3.3 Pendekatan Pengeluaran	34
3.4 Metode Alokasi	35

IV	ULASAN SINGKAT PERKEMBANGAN PDRB	
4.1	Kondisi Ekonomi Tahun 2014	38
4.2	Pertumbuhan PDRB Tahun 2014	42
4.3	Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi 2014	50
4.4	PDRB Perkapita	62
4.5	Indeks Perkembangan	65
4.6	Indeks Berantai	67
4.7	Inflasi	69
4.8	Perkembangan PDRB Sektoral	71
V	Penutup	104
	Tabel Pokok	106
	Lampiran	119

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	47
Tabel 4.2	PDRB Tanpa Minyak Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	48
Tabel 4.3	Distribusi PDRB ADHB Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	58
Tabel 4.4	Distribusi Prosentase Sektor Dominan PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	59
Tabel 4.5	Distribusi Prosentase Sektor Produktif PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	60
Tabel 4.6	Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	61
Tabel 4.7	PDRB Perkapita Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	63
Tabel 4.8	PDRB Perkapita Kab. Blora Tanpa Minyak Tahun 2010 – 2014	63
Tabel 4.9	Perkembangan PDRB Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	66
Tabel 4.10	Luas Panen (HA), Produksi (Ton) Padi dan Palawija Utama Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	73
Tabel 4.11	Jumlah Tanaman, Produksi Buah-Buahan Utama Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	74
Tabel 4.12	Luas Panen, Produksi sayuran Utama Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	75
Tabel 4.13	Luas/Jumlah Tanaman dan Produksi Tanaman Utama Perkebunan di Kab Blora Tahun 2013-2014	76
Tabel 4.14	Populasi Hewan dan Hasil-hasil Utama Peternakan di Kab. Blora Tahun 2013 – 2014	78
Tabel 4.15	Luas Panen dan Produksi Ikan Hasil Budidaya Di Kabupaten Blora Tahun 2012-2014	80
Tabel 4.16	Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014	87

Daftar Isi

Tabel 4.17	Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014	89
Tabel 4.18	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Blora Tahun 2010-2014	92
Tabel 4.19	Jumlah Penumpang Kereta Api di Kab. Blora Tahun 2010-2014	94
Tabel 4.20	Realisasi APBD Kab. Blora Tahun 2013-2014	100
Tabel 4.21	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kab. Blora Tahun 2013-2014	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Blora, Tahun 2010 – 2014	45
Gambar 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	46
Gambar 4.3	Distribusi PDRB ADHB Kab. Blora Tahun 2014	57
Gambar 4.4	PDRB Perkapita Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	64
Gambar 4.5	PDRB Perkapita Kab. Blora Tanpa Minyak Tahun 2010 – 2014	65
Gambar 4.6	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	68
Gambar 4.7	Laju Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	70

DAFTAR TABEL POKOK

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014	85
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014	87
Tabel 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014	89
Tabel 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014	91
Tabel 5	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014	93
Tabel 6	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014	95
Tabel 7	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014	97
Tabel 8	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014	99
Tabel 9	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014	101
Tabel 10	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014	103
Tabel 11	Indeks Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	105
Tabel 12	PDRB Perkapita Kab. Blora ADHB Tahun 2010 – 2014	107
Tabel 13	PDRB Perkapita Kab. Blora ADHK 2000 Tahun 2010 – 2014	107
Tabel 14	Inflasi PDRB Kab. Blora Tahun 2010 – 2014	108

LAMPIRAN

Tabel 15	PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 – 2014	119
Tabel 16	Distribusi Prosentase PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 – 2014	120
Tabel 17	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 – 2014	121
Tabel 18	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 – 2014	122
Tabel 19	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 – 2014	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Kondisi ekonomi Kabupaten Blora tahun 2014 sepertinya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, kondisi tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut yang melambat, atau pertumbuhan ekonomi tahun 2014 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ini antara lain disebabkan oleh turunnya beberapa output produk pertanian dominan, seperti gabah maupun ketela pohon. Walaupun ada kenaikan beberapa produk pertanian lainnya, tetapi belum mampu mengimbangi penurunan produksi gabah karena sumbangan tersebut yang cukup besar.

Sampai saat pertanian masih memberikan *share* yang cukup dominan pada pembentukan PDRB di Kabupaten Blora, yaitu disekitar angka 30 persen. Dengan *share* atau sumbangan yang cukup besar tentunya akan berpengaruh terhadap naik turunnya level PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi. Padahal kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang cukup rentan, banyak faktor yang bisa mengganggu produktifitasnya, dari musim yang kurang bersahabat, curah hujan yang rendah sampai serangan OPT yang sangat mudah terjadi. Disamping itu kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian (perumahan, industri dan lainnya), sehingga ketika suatu wilayah dengan PDRB masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut biasanya sering berfluktuasi dan cukup sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Komponen pembentuk PDRB yang dominan setelah pertanian adalah lapangan usaha perdagangan dengan *share* sekitar 18 persen dan diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana *share* nya tercatat di angka \pm 16 persen dan \pm 14 persen nya adalah dari pertambangan minyak bumi. Pada tahun 2014 kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya, maka secara tidak langsung kondisi ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Blora. Akibat kondisi-kondisi diatas, pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 kembali melambat di tahun sebelumnya, kenaikan beberapa output kegiatan ekonomi lainnya seperti di industri pengolahan, belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2014, Indonesia punya *gawe* besar yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kegiatan tersebut secara tidak langsung telah memutar roda ekonomi. Pergerakan masa membutuhkan akomodasi konsumsi disamping kebutuhan akan transportasi. Disisi lain kebutuhan akan spanduk, baliho maupun poster ikut pula menyumbang meningkatnya industri percetakan untuk tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tetapi semua itu ternyata secara nilai, belum bisa menutup turunnya komoditas pertanian yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 tercatat masih lebih rendah dari tahun 2013.

Sekitar bulan November, premium naik dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500 dan harga solar naik dari Rp. 5.500 naik menjadi Rp. 7.500. Akibat kenaikan harga BBM tersebut otomatis berdampak pada kenaikan tarif angkutan, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang, yang berimbas pada kenaikan biaya distribusi barang dan jasa yang

berdampak pada meningkatnya harga-harga pada hampir semua kebutuhan pokok masyarakat, yang berpengaruh pada naiknya angka inflasi. Target inflasi pemerintah di tahun 2014 terlampaui. Pada tahun 2014 pemerintah menargetkan inflasi berada di sekitar angka $(4,5 \pm 1)$ persen, tetapi pada tahun tersebut angka inflasi tembus di angka 8,36 persen (Nasional), hampir menyamai angka inflasi di tahun sebelumnya. Sedangkan inflasi yang bisa dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang, tercatat sebesar 7,13 persen di Blora, sedangkan rata-rata di Jawa Tengah tercatat sebesar 8,22 persen, lebih rendah dari angka Nasional.

Kenaikan tarif angkutan merupakan jalan keluar yang diterapkan oleh pelaku kegiatan transportasi yang digunakan untuk menutupi biaya operasionalnya, demikian juga kenaikan harga barang dan jasa merupakan strategi yang ditempuh oleh produsen agar masih bisa memperoleh laba dari usahanya. Kenaikan akan harga-harga tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terutama terhadap besaran PDRB *adh* berlaku, yang akan menaikkan pertumbuhan implisitnya. Disamping itu juga berpengaruh terhadap kenaikan biaya-biaya atau yang kita kenal dengan konsumsi antara.

Kenaikan harga bahan bakar minyak, sebagaimana diketahui bahwa bahan bakar minyak sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan hampir semua aktifitas ekonomi sangat tergantung, ternyata tidak begitu terasa dampaknya terhadap produksi barang dan jasa. Kemungkinan karena kenaikan harga bahan bakar minyak terjadi di akhir tahun (2014) dan produsen sudah lebih dahulu mengantisipasinya setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak di tahun sebelumnya.

Indonesia baru saja memiliki presiden yang baru. Kepemimpinan nasional yang baru biasanya mempunyai kebijakan-kebijakan yang baru

pula, termasuk juga kebijakan dalam bidang ekonomi. Presiden terpilih memiliki agenda prioritas yang di tuangkan dalam sembilan program atau disebut *Nawa Cita*, beberapa isinya antara lain: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Program-program tersebut menyiratkan bahwa ada keinginan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan hasil yang bisa dirasakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas, bisa menyerap banyak tenaga kerja yang secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran. Yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan dapat mengentaskan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi perlu diwaspadai beberapa kecenderungan negatif, seperti pertumbuhan yang tinggi biasanya diikuti dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari rasio gini. Rasio Gini di Blora ini cenderung terus naik sejalan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan atau tingkat kemakmuran masyarakat, ternyata terjadi pergeseran tingkat pemerataan pendapatan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu upaya yang dinamakan pembangunan. Riyadi dan Deddy (2005) mendefinisikan kata pembangunan sebagai “semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi

secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan”. Bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat (Syamsiah, 2009).

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya muncul sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pembangunan adalah suatu proses yang terencana, dan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa melalui tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai suatu usaha, pembangunan

merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita, sehingga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan adalah tersedianya data statistik *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Dengan menggunakan data tersebut akan dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut, data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi, analisa, dan bahan perencanaan yang selanjutnya akan bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

1.2. Siklus Kegiatan Ekonomi.

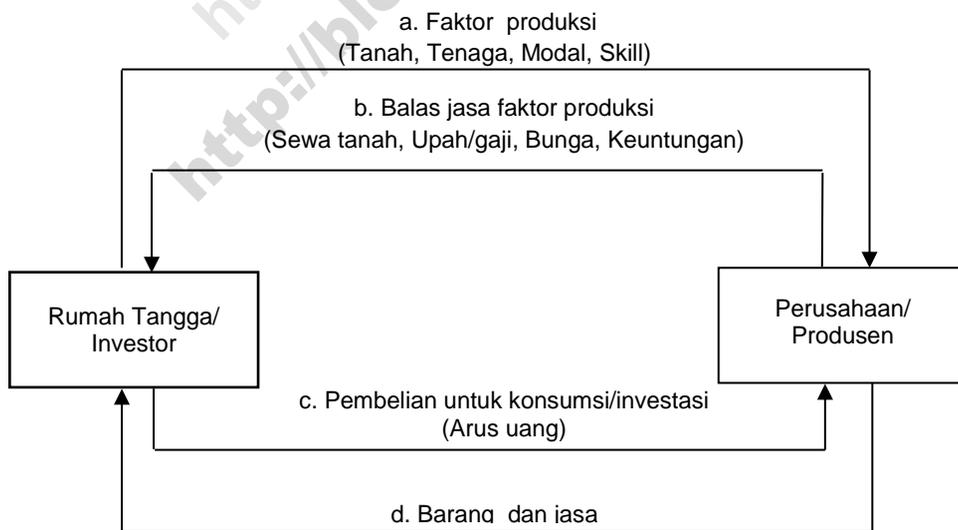
Apabila diperhatikan secara seksama, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok produsen
2. Kelompok konsumen

Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu memakai barang dan jasa, dan satunya mengadakan barang dan jasa, sehingga berkesinambungan dan saling membutuhkan yang akhirnya membentuk suatu siklus perekonomian. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Siklus Ekonomi Sederhana



Kelompok konsumen memiliki :

- a. Faktor produksi berupa (tanah, tenaga, modal dan kewiraswastaan /skill) yang diberikan kepada perusahaan
- b. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi.

Sedangkan dari pihak produsen :

- a. Memberikan balas jasa kepada faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, berupa sewa tanah, upah/gaji, bunga dan keuntungan.
- b. Pengadaan barang dan jasa hasil produksi yang dikonsumsi oleh pihak konsumen.

1.3. Pengelompokan Kegiatan Ekonomi

Kegiatan perekonomian yang terjadi di daerah / wilayah adalah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan tersebut perlu dikelompokkan dalam sektor-sektor yang didasarkan atas kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara berproduksi, sifat dan jenis barang yang dihasilkan serta penggunaan barang dan jasa yang bersangkutan. Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi pengelompokan kegiatan ekonomi ini diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu dapat dilakukan. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini kita namakan sebagai kategori.

1.3.1. Kelompok Kategori

Dalam PDRB Lapangan Usaha tahun dasar 2010, pengelompokan kegiatan ekonomi/usaha dikelompokkan menjadi 17 kategori. Pengelompokan sektor tersebut didasarkan pada Sistem Neraca

Nasional /*System of Nasional Account (SNA)* tahun 2008. SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktifitas ekonomi yang sesuai dengan standar baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDB/PDRB.

Pengelompokan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kategori Pertanian, meliputi subkategori :
 - 1.1.a. Tanaman Pangan
 - 1.1.b. Tanaman Hortikultura Semusim
 - 1.1.c. Perkebunan Semusim
 - 1.1.d. Tanaman Holtikultura Tahunan dan Lainnya
 - 1.1.e. Perkebunan Tahunan
 - 1.1.f. Peternakan
 - 1.1.g. Jasa Pertanian dan Perburuan.
 - 1.2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
 - 1.3. Perikanan
2. Kategori Pertambangan dan Penggalian, meliputi subkategori :
 - 2.1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - 2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit
 - 2.3. Pertambangan Bijih Logam
 - 2.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
3. Kategori Industri Pengolahan, meliputi subkategori :
 - 3.1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
 - 3.2. Industri Makanan dan Minuman
 - 3.3. Pengolahan Tembakau

- 3.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
 - 3.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
 - 3.6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
 - 3.7. Industri Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
 - 3.8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
 - 3.9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - 3.10. Industri Barang Galian bukan Logam
 - 3.11. Industri Logam Dasar
 - 3.12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
 - 3.13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
 - 3.14. Industri Alat Angkutan
 - 3.15. Industri Furniture
 - 3.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
4. Kategori Pengadaan Listrik, Gas, meliputi subkategori :
 - 4.1. Ketenagalistrikan
 - 4.2. Gas
 5. Kategori Pengadaan Air
 6. Kategori Konstruksi
 7. Kategori Perdagangan, meliputi subkategori :
 - 7.1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
 - 7.2 Perdagangan Besar dan Eceran
 8. Kategori Transportasi dan Pergudangan, meliputi subkategori :

- 8.1. Angkutan Rel
- 8.2. Angkutan Darat
- 8.3. Angkutan Laut.
- 8.4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- 8.5. Angkutan Udara
- 8.6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
9. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meliputi subkategori:
 - 9.1. Penyediaan Akomodasi
 - 9.2. Penyediaan Makan Minum
10. Kategori Informasi dan Komunikasi
11. Kategori Jasa Keuangan, meliputi subkategori :
 - 11.1. Bank
 - 11.2. Asuransi dan Dana Pensiun
 - 11.3. Jasa Keuangan Lainnya
 - 11.4. Jasa Penunjang Keuangan
12. Kategori Real Estate
13. Kategori Jasa Perusahaan
14. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

1.3.2. Kelompok Sektor

PDRB juga biasa dikelompokkan berdasarkan atas output maupun input terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor ekonomi. Pengelompokan tersebut adalah sektor primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, sektor sekunder yakni jika input berasal langsung dari sektor primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan sektor tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

1. Kelompok Sektor Primer

- Kategori Pertanian
- Kategori Pertambangan dan Penggalian

2. Kelompok Sektor Sekunder

- Kategori Industri Pengolahan
- Kategori Pengadaan Listrik, Gas
- Kategori Pengadaan Air
- Kategori Konstruksi

3. Kelompok Sektor Tersier

- Kategori Perdagangan
- Kategori Transportasi dan Pergudangan
- Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Kategori Informasi dan Komunikasi
- Kategori Jasa Keuangan
- Kategori Real Estate
- Kategori Jasa Perusahaan
- Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya

1.4. Analisa Dan Kegunaan Data PDRB

1.4.1. Analisa Data PDRB :

Analisa data pada dasarnya dapat diartikan sebagai penjabaran atas pengukuran data kuantitatif menjadi suatu bentuk penyajian yang lebih mudah untuk ditafsirkan, sehingga analisa dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menguraikan suatu masalah baik secara keseluruhan (general) ataupun secara sebagian (parsial).
2. Memperhitungkan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya.

Dalam kaitannya dengan perhitungan PDRB, analisa dapat dilakukan dengan menurunkan parameter yang merupakan beberapa indikator ekonomi makro, seperti: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan perubahan indeks implisit atau tingkat inflasi PDRB dan sebagainya. Parameter-parameter tersebut dapat diturunkan melalui tabel agregasi PDRB yang berupa nilai nominal. Untuk memperoleh informasi mengenai parameter yang akan dianalisa dapat digunakan metode statistik seperti : distribusi persentase, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks implisit.

Tujuan utama dari analisa ini adalah untuk menggambarkan hasil penghitungan PDRB ke dalam bentuk yang relatif sederhana, dengan menggunakan pendekatan metode statistik deskriptif. Selain dari tujuan tersebut, analisa data PDRB juga bertujuan untuk :

1. Mempelajari pola ekonomi daerah.
2. Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dalam suatu daerah dan dalam waktu yang sama.
3. Melakukan perbandingan antar komponen dan relatifnya.
4. Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan di masa mendatang.

1.4.2. Kegunaan Data PDRB :

Data PDRB dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kebutuhan, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik regional maupun sektoral merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) biasanya dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[\frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana :

G : Laju pertumbuhan

P_t : PDRB Adhk tahun ke t

P_{t-1} : PDRB Adhk tahun sebelum t

2. Tingkat Produktivitas Penduduk Suatu Daerah.

Tinggi rendahnya tingkat produktivitas penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka PDRB per kapita yang

diperoleh dari pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

3. Tingkat Perubahan Harga Agregat (Inflasi PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam waktu (tahun) tertentu. PDRB ini dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan perbandingan antara harga berlaku dan harga konstan merupakan angka indeks implisit, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Indeks harga implisit dapat diperoleh/dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$I_{\text{imp.}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{Adhb}}}{\text{PDRB}_{\text{Adhk}}} \times 100$$

Sedangkan inflasi PDRB dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi PDRB} = \left[\frac{I_{\text{imp. t}}}{I_{\text{imp. t-1}}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana :

- $I_{\text{imp.}}$ = Indeks implisit
- $I_{\text{imp.t}}$ = Indeks implisit tahun t
- $I_{\text{imp.t-1}}$ = Indeks implisit tahun t-1

Inflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga di pasaran. Jika terjadi fluktuasi harga yang tinggi maka akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen dan dengan demikian maka konsumen akan merasakan pengaruhnya dimana akan terjadi ketidakseimbangan antara daya beli dengan pendapatan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan bagi para pembaca, sistematika publikasi PDRB disajikan dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Konsep dan Definisi
- III. Metode Penghitungan PDRB
- IV. Ulasan Singkat PDRB Kabupaten Blora
- V. Tabel-Tabel PDRB Kabupaten Blora.

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda perlu disampaikan beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Secara umum PDRB dapat diartikan sebagai seluruh nilai produksi bruto/kotor atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor produksi yang ada di suatu wilayah tertentu dan dihitung pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

2.1. Domestik dan Regional

Wilayah perekonomian yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu perhitungan nasional adalah suatu negara, sedang untuk perhitungan suatu regional adalah suatu region dari suatu negara. Pengertian *Region* disini dapat berupa Propinsi, Kabupaten/Kota atau Daerah Administrasi lain yang lebih rendah.

2.2. Produk Domestik dan Produk Regional

2.2.1. Produk Domestik

Adalah seluruh produk barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak. Yang dimaksud wilayah Domestik suatu region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut (propinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan).

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi di suatu region berasal dari region lain, demikian juga sebaliknya penduduk suatu region melakukan kegiatan proses produksi di region lain. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar region ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa Upah, Gaji, Bunga, Dividen dan Keuntungan, maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dan Produk Regional.

2.2.2. Produk Regional

Adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu region atau produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/luar negeri.

2.2.3. Penduduk Suatu Daerah

Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang per orang atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal secara menetap di wilayah domestik daerah tersebut.

Kecuali:

1. Wisatawan Asing (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan atau yang bertujuan tidak menetap.
2. Awak dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luar region yang sedang masuk dok atau singgah di daerah region tersebut.
3. Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan.

4. Anggota Korps Diplomat, Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut.
5. Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai pekerja musiman saja.
6. Pegawai Badan Internasional/Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan.

Orang-orang tersebut di atas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.

2.2.4. Penduduk Pertengahan Tahun

Yang dimaksud dengan penduduk pertengahan tahun adalah jumlah penduduk pada akhir bulan Juni atau didekati dari jumlah penduduk awal tahun ditambah penduduk akhir tahun dibagi dua.

Dalam menghitung Pendapatan perkapita, pembagi dari produk domestik atau produk regional adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, hal ini dilakukan sebab untuk menghindari kejadian vital (lahir, mati, datang dan pergi) yang fluktuatif tidak menentu sepanjang tahun, maka kita pakai penduduk pertengahan tahun dengan maksud agar jumlah penduduk tersebut betul-betul mencerminkan keadaan tahun tersebut. Juga karena PDRB dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

2.3. Agregat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

2.3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud **Nilai Tambah** adalah nilai yang ditambahkan kepada barang

dan jasa yang dihasilkan atas sebuah proses produksi yang terjadi di dalam suatu kegiatan ekonomi. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi tersebut.

Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi Biaya Antara (BA). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{Nilai Produksi (Output)} - \text{Biaya Antara}$$

- a) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain :
1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
 - Upah dan Gaji sebagai balas jasa pegawai.
 - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
 - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan
 2. Penyusutan barang modal tetap.
 3. Pajak tidak langsung netto.
- b) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan meliputi :
1. Produksi utama
 2. Produksi ikutan, maupun
 3. Produksi sampingan
- c) Biaya Antara (BA) adalah jenis biaya yang terdiri dari barang/jasa yang tidak tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun.

Contoh :

- Barang baku dan penolong untuk menghasilkan output.
- Peralatan dan perlengkapan kerja karyawan.
- Pengeluaran jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi.
- Perbaikan kecil dan penggantian suku cadang yang aus.
- Iklan, Riset pemasaran dan hubungan masyarakat.
- Biaya administrasi.

2.3.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN Adhb)

Perbedaan antara konsep Netto ini dan konsep Bruto di atas, ialah karena konsep bruto masih ada penyusutan di dalamnya, sedangkan untuk nettonya penyusutan harus dikeluarkan. Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRN Adhb} = \text{PDRB Adhb} - \text{Penyusutan}$$

Sedangkan Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai atas susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.

2.3.3. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (PDRN Adbf)

Adalah PDRN Adhb dikurangi pajak tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak penjualan, bea ekspor/impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perorangan. Biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada unit-unit produksi, yang akhirnya mengakibatkan penurunan harga (contoh subsidi Pupuk, BBM, Obat dan

lain-lain). Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut.

PDRN Adbf sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah. Jadi PDRN Adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa :

- Upah dan Gaji sebagai balas jasa pegawai.
- Bunga modal sebagai balas jasa modal.
- Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
- Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tersebut di atas, tidak seluruhnya menjadi milik/pendapatan penduduk region tersebut, sebab ada pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain atas kepemilikan faktor produksi di region tersebut.

2.3.4. Pendapatan Regional

Pendapatan Regional Netto adalah PDRN Adbf dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar region dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari region lain (nett export). Dengan kata lain bahwa Produk Regional Netto (Pendapatan Regional) adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di region / wilayah / daerah di mana dia berdomisili.

2.3.5. Pendapatan Perkapita (*Income Per Capita*)

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita, di antaranya sebagai berikut :

$$\text{a. PDRB Adhb Perkapita} = \frac{\text{PDRB Adh Berlaku}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

$$\text{b. PDRB Adhk Perkapita} = \frac{\text{PDRB Adh Konstan}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

$$\text{c. Income Perkapita} = \frac{\text{Pendapatan Regional}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

2.4. Agregat PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Adhk)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Adhk dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas secara nyata, faktor pengaruh perubahan harga perlu dihilangkan yaitu dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini, selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang besarnya = 100 %, dan difungsikan sebagai pembanding harga-harga pada tahun-tahun tertentu yang akan dihitung.

2.4.1. Perubahan Tahun Dasar 2000 Menjadi 2010

Tahun dasar merupakan perangkat penting yang secara spesifik digunakan untuk penghitungan PDRB. Tekanan tahun dasar adalah dalam penggunaan harga, yang dalam penghitungan PDRB diistilahkan PDRB atas dasar harga konstan (Adhk). PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan nilai PDRB yang hanya dipengaruhi oleh volume atau kuantum. Secara total PDRB tersebut menggambarkan perubahan ekonomi secara "riil" di suatu wilayah.

Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional dinyatakan bahwa estimasi PDRB/PDB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran "0" atau "5". Hal itu dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB/PDB dapat saling diperbandingkan antar negara, wilayah dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam

2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producer Price Index*/PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/ menetapkan PDB.

Perubahan tahun dasar merupakan suatu kegiatan yang cukup sulit, melelahkan, menguras waktu dan biaya. Tetapi kegiatan tersebut harus terus berjalan dan terealisasi tepat waktu, karena ada manfaat

yang akan diperoleh. Dimana manfaat perubahan tahun dasar PDB/PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian nasional/regional terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDB;
- Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Perubahan tahun dasar berarti merubah harga di tahun dasar. Perubahan harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tahun dasar 2010 mengadopsi dari SNA 2008, dimana terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan

Cakupan output pertanian memperlakukan *Cultivated Biological Resources* (CBR) yaitu penyertaan pertumbuhan aset alam hasil

budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi

Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai KBLI 2009 dan KBKI 2010.

2.4.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum Produksi pada tahun yang berjalan yang di nilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing – masing sektor / sub sektornya.

Cara yang lazim digunakan antara lain :

- a. Revaluasi
- b. Ekstrapolasi
- c. Deflasi
- d. Deflasi berganda

a. Revaluasi

Revaluasi diartikan menilai kembali produksi (volume) tahun berjalan dikalikan dengan harga tahun dasar, akan menghasilkan nilai produksi atas dasar harga konstan.

$$\text{NILAI PRODUKSI Adhk} = Q_n^y \times P_o$$

Dimana :

Q_n^y = Jumlah kuantum komoditi y pada tahun berjalan (t_n).

P_o = Harga komoditi y pada tahun dasar (t_o)

b. Ekstrapolasi

Yang perlu diperhatikan dengan cara ini ialah penentuan ekstrapolatornya. Ekstrapolator yang paling baik adalah jumlah produksi dari masing-masing sektor atau subsektor. Sedangkan nilai tambah Adhk yang dihitung dengan ekstrapolasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks kuantum dibagi 100. Indeks kuantum yang dipakai adalah **Indeks Laspayers**, yaitu :

$$\text{IK LASPAYERS} = \frac{Q_n \times P_o}{Q_o \times P_o}$$

Nilai Tambah Bruto tahun berjalan (t_n) Adhk adalah sebagai berikut :

$$\text{NTB Adhk}^y = \text{NTB}_o^y \times \frac{\text{IK}_n^y}{100}$$

Dimana :

NTB Adhk^y = NTB komoditi y pada tahun berjalan (t_n).

NTB_o^y = NTB komoditi y pada tahun dasar (t_o).

IK_n^y = Indeks kuantum Laspayers y pada tahun berjalan (t_n).

Q_n = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan (t_n).

Q_o = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan (t_o).

P_o = Harga pada tahun dasar.

c. *Deflasi*

NTB Adhk yang diperoleh dengan cara ini ialah dengan mendeflate NTB Adhb dengan indeks harga dari barang yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan **mendelfate** adalah membagi nilai tambah Adhb dengan indeks harga dari masing-masing sektor atau subsektor. Sehingga NTB Adhk tahun berjalan komoditi y adalah :

$$\text{NTB Adhk}^y = \frac{\text{NTB Adhb}_n^y}{\text{IH}_n^y} \times 100$$

Dimana :

NTB Adhk^y = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan (tn).

NTB Adhb_n^y = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga berlaku komoditi y pada tahun berjalan (tn).

IH_n^y = Indeks Harga komoditi y pada tahun berjalan (tn).

d. **Deflasi Berganda**

Disebut ganda karena dilakukan deflasi dua kali, yaitu :

1. Membagi nilai produksi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga produksi.
2. Membagi biaya antara atas dasar harga berlaku dengan indeks harga biaya antara.

Selisih antara nomor 1 dan 2 di atas merupakan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$NTBAdhk_n^y = \left[\left(\frac{Q_n^y \times P_n^y}{IH_n^y} \right) - \left(\frac{Q_n^y \times P_n^{Ay}}{IH_n^{Py}} \right) \right] \times 100$$

atau :

$$NTB Adhk_n^y = NP_k^y - NBA_k^y$$

Dimana :

NTB Adhk_n^y = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan (tn).

NP_k^y = Nilai Produksi Atas dasar harga konstan komoditi y.

NBA_k^y = Nilai Biaya Antara Atas dasar harga konstan komoditi y.

BAB III METODE PENGHITUNGAN PDRB

Di dalam penghitungan PDRB Kabupaten dapat dihitung melalui dua metode yaitu **metode langsung** dan **metode tidak langsung**. Yang dimaksud metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang ada baik yang bersumber dari daerah sendiri maupun data dari wilayah yang lebih tinggi. Metode ini menggunakan 3 macam cara pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*).
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).
3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Penghitungan metode tidak langsung ini biasanya hanya ada satu metode yakni Metode alokasi (*Allocation Approach*). Metode penghitungan dengan cara alokasi dilakukan dengan mengalokasikan PDRB Propinsi untuk Kabupaten/Kota atau PDRB Kabupaten untuk Kecamatan dengan menggunakan variabel yang cocok sebagai alokatornya, seperti data produksi, jumlah penduduk, luas lahan, mata pencaharian, dll.

3.1. Metode Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi atau PDRB menurut lapangan usaha, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi **biaya antara** dari masing-masing **nilai produksi bruto** tiap-tiap kategori atau sub kategori.

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen, yaitu belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Penggunaan harga produsen ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah yang benar-benar diterima oleh produsen, sedangkan biaya transport akan dihitung sebagai nilai tambah pada kategori transportasi dan keuntungan pemasaran akan dihitung pada kategori perdagangan. Nilai barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto, sebab masih terdapat biaya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibeli dari sektor lain.

Nilai tambah bruto adalah merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen-komponen diantaranya :

1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
 - Upah dan Gaji sebagai balas jasa pegawai.
 - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
 - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan.
2. Penyusutan barang modal tetap.
3. Pajak tidak langsung netto.

Formulasi Nilai Tambah Bruto dengan pendekatan produksi adalah :

Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai produksi bruto - Biaya antara

Pendekatan ini banyak digunakan pada produksi yang berbentuk barang, seperti sektor pertanian, pertambangan penggalan dan industri pengolahan. Sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari NTB maka akan diperoleh Nilai Tambah Netto.

3.2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan dari segi Pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu :

- Upah dan gaji
- Surplus usaha
- Penyusutan
- Pajak tak langsung netto

Untuk pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

Dari hasil penjumlahan seluruh balas jasa faktor produksi tersebut akan diperoleh Nilai Tambah Netto atas biaya faktor produksi. Sedangkan untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga pasar harus ditambah dengan nilai penyusutan dan pajak tak langsung netto. Metode ini banyak dipakai pada sektor pemerintahan, bank/lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa.

3.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara

menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang berbentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

1. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
2. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode anggaran rumah tangga, metode balance sheet dan metode statistik perdagangan luar daerah/luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti :

- Konsumsi rumah tangga
- Konsumsi pemerintahan
- Konsumsi lembaga swasta non profit
- Perubahan inventory
- Pembentukan modal bruto
- Perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

Dengan menghitung komponen-komponen ini kemudian menjumlahkannya akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku/pasar.

3.4. Metode Alokasi

Yang dimaksud dengan metode Alokasi PDRB adalah menghitung PDRB tingkat propinsi atau tingkat kabupaten dengan cara mengalokir angka PDRB dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat di bawahnya,

dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas :

1. Nilai produksi bruto dan netto.
2. Jumlah produksi/output.
3. Jumlah tenaga kerja.
4. Penduduk.
5. Alokator lain yang dianggap cocok untuk masing-masing daerah.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah yang mendapat alokasi terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor.

Metode alokasi dipakai jika dari ketiga metode sebelumnya sudah tidak mungkin lagi diterapkan. Suatu contoh bila suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berlokasi di daerah lain, sedangkan kantor cabang ini tidak dapat mengetahui nilai tambah yang diperolehnya, oleh karena perhitungan neraca rugi/laba dilakukan oleh kantor pusat. Untuk mengatasi hal semacam itu, penghitungan nilai tambahnya terpaksa dilakukan dengan alokasi menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan suatu cabang terhadap kantor pusat.

Dari keempat metode di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengeluaran/permintaan akhir akan sama dengan produk akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Demikian juga nilai tambah produk barang dan jasa akan sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat. Selanjutnya produk domestik regional bruto seperti yang dimaksudkan di atas disebut Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga pasar.

Tabel 3.1 Metode Pendekatan Penghitungan PDRB Menurut Lapangan Usaha

No	Kategori/Subkategori	Metode yang Digunakan
1	2	3
1	Kategori Pertanian, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
2	Kategori Pertambangan dan Penggalian, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
3	Kategori Industri Pengolahan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
3	Kategori Pengadaan Listrik, Gas, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
5	Kategori Pengadaan Air	Pendekatan Produksi
6	Kategori Konstruksi	Pendekatan Pendapatan
7	Kategori Perdagangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
8	Kategori Transportasi dan Pergudangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
9	Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meliputi subkategori:	Pendekatan Produksi
10	Kategori Informasi dan Komunikasi	Pendekatan Produksi
11	Kategori Jasa Keuangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Pendapatan
12	Kategori Real Estate	Pendekatan Produksi
13	Kategori Jasa Perusahaan	Pendekatan Pendapatan
14	Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Pendekatan Pendapatan
15	Jasa Pendidikan	Pendekatan Produksi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pendekatan Produksi
17	Jasa Lainnya	Pendekatan Produksi

BAB IV ULASAN SINGKAT

4.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2014

Mulai tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto disusun menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun dasar 2010, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 merubah wajah PDRB Kabupaten Blora. Perubahan ini terjadi karena ada pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008. Secara umum perbedaan tahun dasar 2010 dengan tahun dasar sebelumnya antara lain: memecah kegiatan ekonomi dari 9 sektor menjadi 17 kategori, level PDRB menjadi semakin besar dibandingkan dengan PDRB yang menggunakan tahun dasar 2000, dan perubahan-perubahan lainnya. Peningkatan level PDRB antara lain disebabkan oleh:

1. Cakupan output pertanian memperlakukan *Cultivated Biological Resources* (CBR) yaitu penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa yang belum berbuah/dipanen.
2. Eksplorasi dan evaluasi barang tambang pada tahun dasar 2010 dicatat sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto yang menjadikan output pertambangan nilainya sangat meningkat dibandingkan dengan tahun dasar sebelumnya.
3. Menambah cakupan, yaitu memasukkan kegiatan yang sebelumnya belum tercakup didalam PDRB tahun dasar 2000 tetapi kegiatan itu

ada dilapangan, seperti industri pengilangan migas dan angkutan penyeberangan sungai, termasuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang dulunya belum tercover ataupun adanya kegiatan-kegiatan yang baru.

Fundamental ekonomi Kabupaten Blora sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan pertanian. Sumbangan kegiatan pertanian berada di kisaran angka 30 persen, dan kecenderungannya terus menurun perannya dari 30,88 persen di tahun 2010 menjadi 29,71 persen di tahun 2011 dan pada tahun 2014 tercatat sebesar 27,22 persen. Dengan sumbangan yang hampir sepertiga PDRB, tentunya peran pertanian masih cukup penting sebagai pendorong ekonomi di Kabupaten Blora. Kenaikan atau penurunan kegiatan tersebut akan berdampak secara signifikan pada kenaikan atau penurunan PDRB Kabupaten Blora secara umum.

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora melambat, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ini salah satunya disebabkan karena penurunan output pertanian. Disamping pertanian lapangan usaha yang juga berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan adalah: kegiatan pertambangan penggalian. Walaupun disisi lain hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tetapi ternyata pertumbuhan negatif di lapangan usaha pertanian menjadikan total pertumbuhan ekonomi Blora tahun 2014 masih lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Kegiatan akbar di tahun 2014 berupa pemilu legislatif serta presiden dan wakil presiden, ternyata belum mampu mendorong ekonomi untuk bergerak lebih cepat. Walaupun kita akui ada kegiatan-kegiatan

yang tumbuh akibat adanya kegiatan besar tersebut, seperti kegiatan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan akibat pergerakan manusia, dan sedikit berimbas pada industri, terutama industri percetakan dan sablon yang begitu dibutuhkan pada perhelatan besar tersebut. Tetapi karena peran masing-masing kategori tersebut masih jauh dari kategori pertanian, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dihindari.

Seperti halnya dengan tahun dasar 2000, dengan tahun dasar yang baru yaitu tahun dasar 2010, fundamental ekonomi Kabupaten Blora masih didominasi oleh kegiatan pertanian, kemudian diikuti oleh kegiatan perdagangan, pertambangan penggalian dan industri pengolahan. Di industri pengolahan dengan tahun dasar baru *share*-nya meningkat cukup tinggi yang disebabkan karena masuknya industri pengilangan minyak dan gas, serta memperkirakan nilai dari hasil industri yang dikonsumsi sendiri. Disektor keuangan (PDRB tahun dasar 2000), menduduki peringkat ke tiga, tetapi dengan tahun dasar 2010, sektor keuangan dipecah menjadi kategori jasa keuangan, kategori real estate dan jasa perusahaan, sehingga perannya menjadi semakin kecil.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora di tahun 2014 tercatat sebesar 4,39 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,36 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi ekonomi regional Jawa Tengah yang tahun 2014 pertumbuhannya meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,42 persen, lebih tinggi dari tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,14 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,02 persen dan jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,58 persen.

Untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi pada kegiatan pertanian, dengan harapan pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa dipacu setiap tahun, bisa dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber ekonomi baru. Masih banyak kegiatan ekonomi yang bisa digarap dengan pertimbangan melimpahnya bahan baku, seperti kegiatan industri pengolahan. Dalam sejarahnya industri pengolahan merupakan kegiatan yang bisa mendorong gerak ekonomi masyarakat. Dampaknya cukup terasa dan bisa memberi *multiplier effect* untuk memutar roda ekonomi masyarakat sekitarnya. Pengembangan industri pengolahan bisa menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi lokal. Ke depan pengembangan industri berbasis sektor pertanian bisa dijadikan alat untuk memacu ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Sekarang tinggal bagaimana peran pemerintah daerah khususnya untuk bisa mendorong hal itu bisa terwujud.

Pengembangan ekonomi lokal pada intinya adalah pembangunan berlandaskan pada kemandirian lokal, yaitu suatu upaya meningkatkan pembangunan disuatu wilayah, dimana tidak semata-mata menekankan pada peranan kekuatan luar (*external forces*), tetapi lebih mengutamakan peranan dari dalam (*internal forces*), melalui upaya dengan mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang kreatif dan produktif, peningkatan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan, untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat.

Untuk bisa mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru diperlukan analisis potensi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai kategori maupun subkategori ekonomi di wilayah tersebut. Kategori

ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong kategori-kategori ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa kategori unggulan adalah kategori yang memiliki keunggulan komparatif (*comparatif advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk kategori sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar.

4.2 Pertumbuhan PDRB Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, sumber daya modal. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun menurut harga konstan.

Penyajian angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik adh berlaku maupun adh konstan dibuat secara series (lima tahun), sehingga akan mampu memberikan gambaran kinerja ekonomi secara makro dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya angka-angka tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan oleh pengguna data

sebagai bahan monitoring, evaluasi, kajian maupun perencanaan, sehingga didapat keputusan yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Pada tahun 2014, besaran PDRB menurut harga berlaku Kabupaten Blora tercatat sebesar 15.055 milyar rupiah yang menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai sebesar 13.544 milyar rupiah sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 11,15 persen. Pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku merupakan pertumbuhan semu, karena belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, dimana masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga atau didalamnya masih mengandung angka inflasi ataupun deflasi.

Atas dasar harga berlaku, lapangan usaha industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 23,42 persen, kemudian disusul oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami pertumbuhan sebesar 18,09 persen dan lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,94 persen. Tingginya pertumbuhan adh berlaku terjadi karena pertumbuhan riil akibat kenaikan output dan juga akibat kenaikan harga barang dan jasa yang cukup naik tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari inflasi di kategori-kategori tersebut yang cukup tinggi.

Untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau pertumbuhan sebenarnya, karena telah menghilangkan pengaruh inflasi/deflasi, dapat diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010=100), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora untuk tahun 2014 tercatat sebesar 4,39 persen, atau dari 11.712 milyar rupiah di tahun 2013 menjadi 12.227 milyar rupiah pada tahun 2014. Pertumbuhan tersebut

lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,36 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari melambatnya pertumbuhan beberapa kategori dominan yang ada di Kabupaten Blora, seperti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Atas dasar harga konstan, lapangan usaha industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 14,46 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,03 persen dan lapangan usaha jasa pendidikan yang tumbuh sebesar 12,73 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar minus 5,61 persen.

Pertambahan penduduk, bertambahnya ragam kebutuhan masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat merupakan pendorong di lapangan usaha di industri pengolahan. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang dominan keempat setelah lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan industri pengolahan tahun 2014 ini dipicu dengan mulai beroperasinya pabrik gula, yang menyumbang output cukup besar bagi peningkatan PDRB di tahun tersebut. Sedangkan perkembangan yang sangat pesat teknologi informasi dan telekomunikasi dengan lahirnya bermacam smartphone juga telah mendorong permintaan masyarakat akan jasa telekomunikasi tersebut, sehingga di tahun 2014 ini lapangan usaha tersebut tumbuh cukup bagus. Selanjutnya program-program pemerintah di bidang pendidikan telah mendorong lapangan usaha jasa pendidikan tumbuh cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Ada keterkaitan erat antara pertumbuhan beberapa lapangan usaha, seperti pertumbuhan tinggi di lapangan usaha industri pengolahan akan mendorong lapangan usaha perdagangan dan jasa keuangan untuk tumbuh. Hasil-hasil industri akan secara aktif diperdagangkan baik di wilayah sendiri maupun dijadikan sebagai komoditas ekspor.

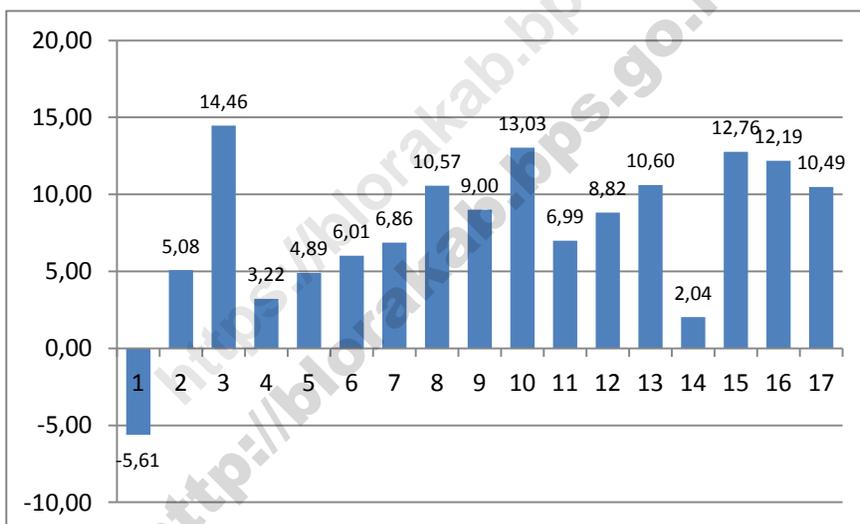
Lapangan usaha jasa keuangan merupakan penyedia modal usaha yang diperlukan oleh tidak hanya kategori tertentu, tetapi hampir semua kegiatan ekonomi membutuhkan kategori keuangan. Perkembangan kategori keuangan ini juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, serta pola konsumsi masyarakat. Saat ini yang namanya lembaga-lembaga pembiayaan tumbuh cukup pesat. Kondisi ini adalah merupakan salah satu imbas dari pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam dan modern.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blora Tahun 2010-2014



Dilihat dari gambar 4.1 terlihat bahwa lapangan usaha pertambangan penggalan utamanya kegiatan pertambangan minyak bumi cukup memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora, sedangkan pertumbuhan menurut lapangan usaha cukup fluktuatif dari pertumbuhan 14,46 persen di industri pengolahan sampai minus 5,61 persen di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2014



1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2 Pertambangan dan Penggalan

3 Industri Pengolahan

4 Pengadaan Listrik dan Gas

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6 Konstruksi

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8 Transportasi dan Pergudangan

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10 Informasi dan Komunikasi

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

12 Real Estate

13 Jasa Perusahaan

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

15 Jasa Pendidikan

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17 Jasa lainnya

Seperti kecenderungan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan pertumbuhan terendah, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Adh konstan kategori ini tumbuh sebesar minus 5,61 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat 2,47. Tingginya NTB kategori pertanian ini menyebabkan kategori ini tidak pernah tumbuh tinggi. Disamping keterbatasan lahan, minimnya infrastruktur penunjang, kategori ini juga sangat rawan terhadap kondisi cuaca dan serangan hama tanaman. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan di kategori pertanian tergolong rendah, tetapi kategori pertanian ini merupakan penggerak utama perekonomian di Kabupaten Blora. Pertumbuhan positif kategori pertanian ini sangat mempengaruhi pertumbuhan agregat Kabupaten Blora dengan pula sebaliknya, ketika tumbuh lapangan usaha ini tumbuh negatif maka biasanya pertumbuhan PDRBnya (total PDRB Kabupaten) akan terjadi perlambatan.

Tabel : 4.1 PDRB Kabupaten Blora Dengan Minyak Tahun 2010 – 2014

Th	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh konstan 2010	
	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	10.149.079,63	14,46	10.149.079,63	5,07
2011	11.373.376,27	12,06	10.597.723,01	4,42
2012	12.285.562,55	8,02	11.116.865,90	4,90
2013	13.544.646,54	10,25	11.712.504,85	5,36
2014	15.055.175,26	11,15	12.227.201,29	4,39

Dari tabel 4.1 di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan terendah menurut harga berlaku adalah tahun 2012 yang tercatat sebesar 8,02 persen sedangkan pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2010 yakni sebesar 14,46 persen. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2013 yakni sebesar 5,36 persen dan yang terendah sebesar 4,39 persen pada tahun 2014.

**Tabel : 4.2 PDRB Kabupaten Blora
Tanpa Minyak Tahun 2010 – 2014**

Th	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh konstan 2010	
	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	8.786.056,11	13,30	8.786.056,11	5,79
2011	9.717.743,00	10,60	9.160.112,22	4,26
2012	10.639.751,77	9,49	9.603.310,46	4,84
2013	11.757.236,71	10,50	10.093.016,31	5,10
2014	13.006.771,64	10,63	10.540.216,82	4,43

Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Blora terutama pada tahun 2014 ini cukup baik, walaupun ada perlambatan dibanding tahun sebelumnya, lapangan kerja diharapkan semakin terbuka, barang dan jasa juga mudah didapat di pasaran sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Kedepan diharapkan potensi-potensi penggerak pertumbuhan akan semakin dikembangkan melalui perbaikan infrastruktur. Pembukaan daerah-daerah terisolir di harapkan juga kana mampu mendorong ekonomi semakin berkembang. Tetapi disisi lain

yang perlu diperhatikan adalah faktor pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan baik pemerataan antar wilayah maupun antar individu.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pembangunan ekonomi salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran warganya, namun demikian pada kenyataannya jarang dapat berjalan bersama, banyak faktor yang mempengaruhinya misalnya kepemilikan modal yang terpusat pada perseorangan/kelompok/wilayah tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan nilai tambah bruto yang besar itu semuanya belum tentu dinikmati oleh penduduk setempat.

Selanjutnya ada satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam penghitungan PDRB, yaitu Nilai Tambah Bruto yang dihitung tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak. Dimana komponen-komponen Nilai Tambah Bruto terdiri dari :

1. Pendapatan faktor yaitu :
 - Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai/karyawan.
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
 - Bunga sebagai balas jasa modal.
 - Keuntungan sebagai balas jasa modal.
2. Penyusutan barang modal tetap.
3. Pajak tak langsung netto.

Dari ketiga komponen tersebut, tidak semua diterima oleh penduduk region/wilayah ini. Bisa terjadi pertumbuhan PDRB tinggi, tetapi tidak semua pendapatan perkapitanya diterima oleh penduduk Kabupaten Blora. Jika menghendaki pendapatan murni dari penduduk Kabupaten Blora, maka perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. PDRB ditambah dengan pendapatan penduduk Blora yang diterima dari luar daerah/luar negeri.
2. PDRB dikurangi dengan pendapatan yang dibawa/dibayarkan keluar daerah/luar negeri

Dari kedua hal tersebut di atas jika kita gabungkan dihasilkan Produk Regional Netto yaitu pendapatan murni penduduk Kabupaten Blora. Untuk memperoleh Produk Regional Netto tersebut, team penyusun masih menemui banyak kendala teknis utamanya ketersediaan data.

4.3 Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi 2014

Sumbangan/*share* Nilai Tambah Bruto masing-masing kategori terhadap total Nilai Tambah Bruto (PDRB) biasa kita sebut sebagai Distribusi PDRB. Distribusi PDRB menggambarkan struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi distribusinya, berarti semakin besar peranan kategori/sub kategori tersebut sebagai penyumbang ekonomi wilayah dan sebaliknya. Seiring perjalanan waktu, akibat perubahan faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan teknologi, keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perubahan orientasi kebijakan pemerintah maupun perubahan ekonomi nasional dan internasional akan sangat berpengaruh terhadap perubahan tiap kategori ekonomi. Akibatnya, output tiap kategori akan berbeda satu dengan yang lainnya, akibatnya distribusi kategori ekonomi dalam komposisi PDRB juga mengalami pergeseran atau perubahan. Untuk melihat besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB digunakan PDRB *adh* berlaku.

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, kategori pertanian dan kategori perdagangan besar dan eceran masih merupakan kategori andalan bagi perekonomian Kabupaten Blora, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB, baik dengan tahun dasar 2000 maupun dengan tahun dasar yang baru yaitu tahun dasar 2010. Selanjutnya dengan penerapan SNA 2008, lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan sumbangannya meningkat menjadi peringkat ke tiga dan keempat.

Pada tahun 2014 sumbangan kategori pertanian tercatat sebesar 27,22 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 29,92 persen. Dalam lima tahun terakhir distribusi pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung terus turun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kategori pertanian sudah mulai jenuh. Kecenderungan tersebut salah satunya dipengarungi oleh luas lahan pertanian yang kian lama kian menyusut, walaupun teknologi pertanian dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan akan terus berkembang. Besar kecil atau naik turunnya sumbangan atau distribusi suatu lapangan usaha dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha tersebut ataupun lapangan usaha lainnya. Dari sembilan kategori, kategori pertanian pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya. Penurunan tersebut merupakan fenomena, dimana ada pergeseran struktur dari daerah agraris menuju daerah non agraris, walaupun kalau dilihat pergeserannya relatif sangat lambat. Tetapi walaupun kategori pertanian distribusinya cenderung menurun, tetapi kategori ini masih cukup dominan dalam menggerakkan perekonomian khususnya di Kabupaten Blora.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Distribusi kategori ini tercatat sebesar 16,70 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, kehutanan dan perikanan punya peran yang terus turun. Kategori ini punya distribusi yang cenderung turun terutama dalam lima tahun terakhir. Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya peran kategori perdagangan ini, salah satunya adalah pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang cenderung terus turun dalam beberapa tahun terakhir berakibat pula pada penurunan kontribusi di lapangan usaha perdagangan.

Pada tahun dasar 2000 (2000=100), kegiatan akomodasi konsumsi yang sebelumnya bergabung dengan lapangan usaha perdagangan, dengan tahun dasar 2010 (2010=100) kegiatan tersebut dipisah menjadi kategori tersendiri yaitu kategori I, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha ini pada tahun 2014 memberikan share sebesar 3,43 persen terhadap PDRB dan menempati urutan ke 8 sebagai penyumbang PDRB kabupaten Blora.

Perkembangan kategori perdagangan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk akan diikuti dengan permintaan barang dan jasa yang semakin meningkat. Kedua adalah surplus dari kategori pertanian, kategori pertambangan penggalian dan kategori industri pengolahan. Ketika ketiga kategori tersebut tumbuh, maka surplus produksi dari ketiga kategori tadi akan menjadi barang yang diperdagangkan dan sebaliknya. Ketiga adalah kemudahan transportasi barang dan jasa yang mempermudah distribusi barang dan jasa antar wilayah, dan masih

banyak lagi lainnya yang cukup berperan dalam perkembangan kategori G, yaitu perdagangan besar dan eceran.

Distribusi PDRB selanjutnya adalah distribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Dengan penerapan SNA 2008, nilai tambah bruto kegiatan tersebut tidak hanya output, tetapi termasuk juga kajian (topografi, geologi, geofisika dan geokimia), pengeboran eksplorasi, pengambilan contoh, dan aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral, sehingga dengan penerapan SNA 2008 tersebut, sumbangan lapangan usaha ini cukup besar. Pada tahun 2014 memberikan andil sebesar 14,64 persen yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,80 persen. Dan dalam penyerapan tenaga kerja relatif kecil (dibandingkan kategori pertanian ataupun kategori perdagangan), demikian juga perannya dalam mendorong ekonomi di Kabupaten Blora tidak begitu tampak. Kondisi ini terjadi karena output murni yang dihasilkan cukup kecil dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat lokal yaitu masyarakat di Kabupaten Blora.

Kategori yang cukup dominan berikutnya adalah kategori C atau lapangan usaha industri pengolahan. Dengan masuknya industri pengilangan migas di Cepu dan beroperasinya pabrik gula di Todanan, sedikit banyak memperbesar peran lapangan usaha industri pengolahan. Lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2014 sebesar 11,41 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,27 persen. Dengan pertumbuhan sebesar 23,42 persen adh berlaku, dapat meningkatkan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 1,14 persen. Dilihat dari

sumbangannya yang relatif tinggi diharapkan kalau lapangan usaha ke depan akan banyak berperan di dalam menggerakkan ekonomi di Kabupaten Blora.

Pada PDRB tahun dasar 2000, lapangan usaha jasa terbagi menjadi jasa pemerintahan dan jasa swasta, sedangkan dengan tahun dasar 2010 lapangan usaha tersebut terpecah menjadi kategori O-U atau lapangan usaha administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa-jasa lainnya. Dari kategori-kategori tersebut kategori P atau lapangan usaha jasa pendidikan memiliki distribusi yang tertinggi. Pada tahun 2014, lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten sebesar 6,45 persen, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,18 persen. Kategori ini merupakan kategori rangking ke 5 dari 17 kategori PDRB tahun dasar 2010.

Kategori O atau lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2014 memberikan distribusi terhadap PDRB sebesar 3,81 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,89 persen. Selanjutnya kategori Q atau lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2014 mempunyai distribusi sebesar 0,96 persen dan kategori R,S,T,U atau lapangan usaha jasa lainnya memberikan kontribusi terhadap PDRB adh berlaku di tahun 2014 sebesar 2,19 persen.

Pada tahun 2014 pertumbuhan kategori F, yaitu lapangan usaha konstruksi tercatat sebesar 6,01 persen, kondisi ini berimbas pada peningkatan kontribusi kategori bangunan terhadap total PDRB Kabupaten, dari 4,12 persen di tahun 2013 menjadi 4,32 persen di tahun 2014. Peran kategori ini dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami

pergeseran yang berarti masih disekitar angka 4 persen. Dalam beberapa tahun ke depan, kategori bangunan ini kemungkinan masih tetap tumbuh tinggi, terutama karena dukungan pemerintah terutama dalam pembenahan infrastruktur baik jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya, disamping pertumbuhan jumlah penduduk yang secara tidak langsung ikut menyumbang di kategori konstruksi akibat kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal maupun tempat usaha.

Lapangan usaha angkutan dan komunikasi (tahun dasar 2000) di pecah menjadi lapangan usaha transportasi, pergudangan dan lapangan usaha informasi, komunikasi. Pada tahun 2014, distribusi PDRB masing-masing kategori ini tercatat sebesar 2,76 persen untuk lapangan usaha transportasi, pergudangan, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,60. Di Kabupaten Blora, kegiatan transportasi masih didominasi oleh angkutan barang terutama untuk mengangkut barang galian dari Blora ke luar wilayah. Blora juga dilalui oleh jaringan kereta api, tetapi sumbangan angkutan rel ini masih kecil terutama dalam mendorong roda ekonomi di Kabupaten Blora.

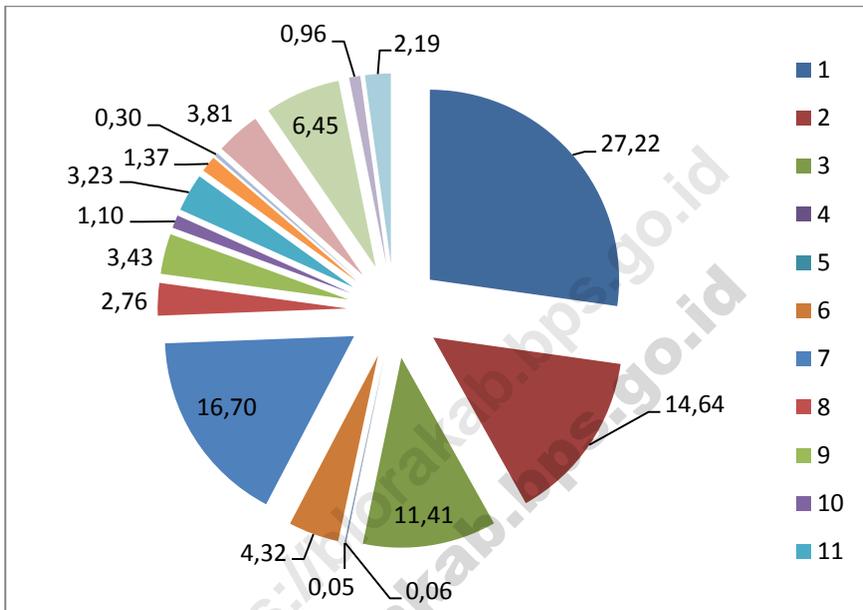
Sedangkan lapangan usaha komunikasi memberikan andil sebesar 1,10 persen di tahun 2014, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,13 persen. Walaupun *share* nya kecil lapangan usaha ini cukup vital dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Diera keterbukaan informasi, peran komunikasi sangat penting, ditambah dengan pola budaya dan trend di masyarakat yang semakin modern. Dalam beberapa tahun ke depan lapangan usaha ini diperkirakan masih akan memberikan pertumbuhan yang tinggi tetapi dengan *share* yang masih relatif kecil.

Lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebelumnya bergabung menjadi satu sektor. Dengan tahun dasar 2010, lapangan usaha tersebut pecah menjadi kategori K, yaitu lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori L atau lapangan usaha real estate dan kategori M,N atau lapangan usaha jasa perusahaan.

Pada tahun 2014 lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,23 persen, real estate sebesar 1,37 persen dan jasa perusahaan sebesar 0,30 persen. Walaupun sumbangan terhadap PDRB prosentasenya kecil, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi merupakan lapangan usaha yang sangat penting dalam memberikan mendukung kemajuan di hampir seluruh lapangan usaha. Pengembangan usaha selalu membutuhkan modal, dan modal tersebut diperoleh dari kegiatan perbankan.

Kategori selanjutnya yaitu kategori D dan E, yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Masing-masing memberikan distribusi kepada PDRB Kabupaten Blora sebesar 0,06 persen dan 0,05 persen. Sumbangan terhadap PDRB sangat kecil tetapi peran bagi umat manusia maupun dalam kegiatan usaha sangatlah besar. Hampir semua lapangan usaha membutuhkan listrik maupun air.

Gambar 4.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2014 (%)



- | | |
|---|---|
| 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 10 Informasi dan Komunikasi |
| 2 Pertambangan dan Penggalian | 11 Jasa Keuangan dan Asuransi |
| 3 Industri Pengolahan | 12 Real Estate |
| 4 Pengadaan Listrik dan Gas | 13 Jasa Perusahaan |
| 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
| 6 Konstruksi | 15 Jasa Pendidikan |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 17 Jasa lainnya |
| 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |

Dari tabel 4.2 dibawah terlihat bahwa lapangan usaha pertanian kontribusinya cenderung terus turun, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran cenderung turun juga sedangkan lapangan usaha industri pengolahan cenderung naik terutama dalam lima

tahun terakhir. Sedangkan kategori lainnya cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 4.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,88	29,71	29,65	29,92	27,22
B	Pertambangan dan Penggalian	13,90	15,14	14,12	13,80	14,64
C	Industri Pengolahan	9,65	9,81	10,15	10,27	11,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
F	Konstruksi	4,12	3,94	4,16	4,12	4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,70	17,69	17,13	16,88	16,70
H	Transportasi dan Pergudangan	2,81	2,57	2,58	2,60	2,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,60	3,47	3,43	3,30	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,17	1,17	1,13	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,09	3,06	3,21	3,20	3,23
L	Real Estate	1,42	1,35	1,33	1,32	1,37
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,20	3,91	3,99	3,89	3,81
P	Jasa Pendidikan	3,99	4,81	5,80	6,18	6,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,81	0,89	0,90	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,29	2,17	2,01	2,07	2,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tujuh belas kategori kegiatan ekonomi di Kabupaten Blora terdapat empat kategori yang cukup dominan yaitu, kategori A, B, C dan G, yaitu lapangan usaha pertanian,kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,. Jumlah andil dari keempat kategori dominan tersebut terhadap total PDRB kabupaten tercatat sebesar 69,96 persen pada tahun 2014.

Selain ada kelompok kategori dominan disajikan pula kelompok kategori produktif, yaitu kategori yang relatif masih dapat ditingkatkan outputnya karena cukup potensial, yaitu selain kategori tersebut.

Tabel 4.4 Distribusi Prosentase Kategori Dominan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014

Kategori	Lapangan Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
		2013	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,92	27,22	-2,70
B	Pertambangan dan Penggalian	13,80	14,64	0,84
C	Industri Pengolahan	10,27	11,41	1,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,88	16,70	-0,18
J U M L A H		70,88	69,96	-0,91

Dilihat struktur perekonomian Kabupaten Blora dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya pergeseran fundamental ekonomi tidak terjadi. Ketika beberapa kategori menjadi kategori dominan, sepertinya akan tetap seperti itu dalam kurun waktu yang lama. Sehingga bisa dikatakan untuk bisa merubah struktur suatu perekonomian, dibutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal maupun teknologi. Sehingga ketika suatu kategori dikatakan memiliki kontribusi yang kecil terhadap total PDRB maka hal itu akan tetap demikian selama belum ada upaya yang luar biasa untuk menggerakkan roda kategori-kategori tersebut.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa peranan kategori-kategori yang tidak begitu dominan dalam beberapa tahun juga tidak begitu mengalami perubahan struktur, artinya peran kategori-kategori tersebut terhadap

fundamental ekonomi di Blora kemungkinan akan tetap sama dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 4.5 Distribusi Prosentase Kategori Produktif PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014

Kategori	Lapangan Usaha	Adh Bertaku (%)		Perub (%)
		2013	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,05	0,00
F	Konstruksi	4,12	4,32	0,20
H	Transportasi dan Pergudangan	2,60	2,76	0,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,43	0,12
J	Informasi dan Komunikasi	1,13	1,10	-0,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,20	3,23	0,04
L	Real Estate	1,32	1,37	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,89	3,81	-0,09
P	Jasa Pendidikan	6,18	6,45	0,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,96	0,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07	2,19	0,12
	J U M L A H	29,12	30,04	0,91

Disamping terbagi ke dalam 17 kategori, PDRB juga biasa dikelompokkan berdasarkan atas output maupun input terjadinya proses produksi untuk masing-masing kategori ekonomi. Pengelompokan tersebut terdiri atas kategori primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, kategori sekunder yakni jika input berasal langsung dari kategori primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan kategori tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

Pengelompokan kategori PDRB terhadap kelompoknya adalah:

- Kelompok primer** : Lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan/ penggalian.
- Kelompok sekunder** : lapangan industri pengolahan, pengadaan listrik/gas dan pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bangunan/konstruksi.
- Kelompok tersier** : Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha pengangkutan, pergudangan, lapangan usaha informasi, komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, adm pemerintahan /hankam dan jasa-jasa.

Tabel 4.6 Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013 – 2014

Kelompok Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Primer	43,72	41,86	-1,86
Kelompok Sekunder	14,51	15,84	1,33
Kelompok Tersier	41,77	42,30	0,53
J U M L A H	100,00	100,00	0,00

Dari ketiga kelompok kategori pada tabel 4.5 terlihat bahwa jika dibandingkan antara tahun 2014 terhadap tahun 2013, terlihat ada pergeseran kontribusi. Pada kelompok kategori primer terjadi penurunan kontribusi terhadap total PDRB. Sebaliknya pada kelompok kelompok sekunder dan kategori tersier mengalami mengalami kenaikan kontribusi terhadap total PDRB.

4.4 PDRB Perkapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Dengan peran minyak bumi yang semakin besar, padahal nilai tambah dari minyak bumi diperoleh tidak hanya output murninya (minyak mentah) saja yang dihitung tetapi evaluasi dan eksplorasi juga dicakup sebagai PMTB yang juga dihitung sebagai output, maka penghitungan PDRB perkapita juga dipisahkan untuk bisa memberi gambaran yang lebih riil.

Tabel : 4.7 PDRB Perkapita adh Berlaku Dengan Minyak Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB Perkapita Dengan Minyak	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2010	12.274.375	14,46
2011	13.657.546	11,27
2012	14.660.698	7,35
2013	16.080.072	9,68
2014	17.787.169	10,62

Dengan memasukkan minyak bumi, PDRB perkapita tahun 2014 tercatat sebesar 17,79 juta rupiah, meningkat 10,62 persen dari tahun sebelumnya. Karena penghitungan PDRB perkapita berdasarkan adh berlaku, maka punya kecenderungan PDRB perkapita terus meningkat.

Tabel : 4.8 PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB Perkapita Tanpa Minyak	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2010	10.625.924	13,30
2011	11.669.404	9,82
2012	12.696.707	8,80
2013	13.958.076	9,93
2014	15.367.051	10,09

Sedangkan PDRB perkapita yang tanpa minyak pada tahun 2014 tercatat sebesar 15,37 juta rupiah, atau meningkat 10,09 persen dari tahun sebelumnya.

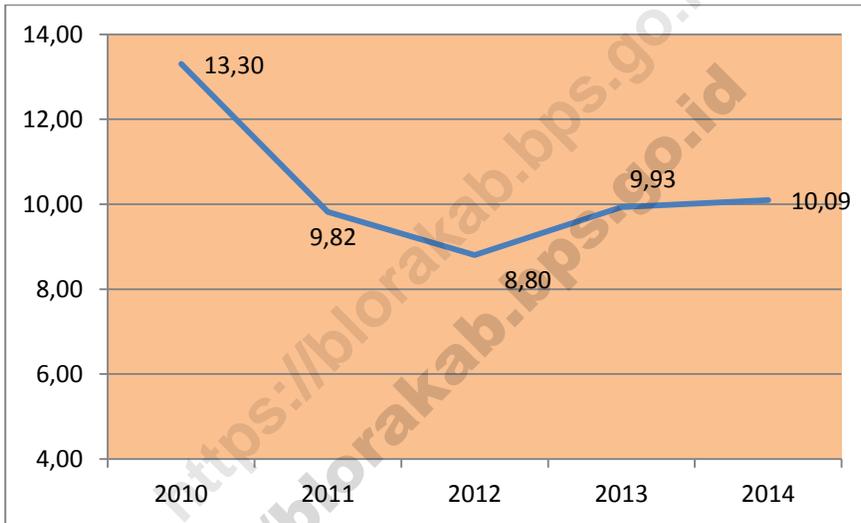
Gambar 4.4 Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Dengan Minyak Kabupaten Blora Tahun 2010-2014



Jika memperhatikan tabel dan gambar perkembangan PDRB perkapita tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita akan berbanding lurus dengan besaran maupun pertumbuhan PDRB. Kondisi ini tidak lepas dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Untuk PDRB perkapita akan cenderung naik, namun demikian belumlah dapat dikatakan bahwa angka tersebut menggambarkan kemakmuran yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Blora tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Blora saja, akan tetapi ada yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk luar Kabupaten Blora yang melakukan

investasi di Kabupaten Blora. Dengan demikian, PDRB perkapita belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat Blora, untuk itu perlu kajian khusus oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk meneliti sejauh mana tingkat pendapatan riil masyarakat Kabupaten Blora.

Gambar 4.5 Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Kabupaten Blora Tahun 2010-2014



4.5 Indeks Perkembangan

Indeks perkembangan adalah suatu indeks yang menggambarkan perkembangan angka PDRB yang dibandingkan dengan tahun dasar, yaitu membagi besaran PDRB pada suatu tahun t dengan besaran PDRB tahun 2010. Semakin besar angka suatu kategori berarti perkembangan kategori tersebut semakin cepat dan sebaliknya.

Indeks perkembangan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 148,34 persen atau senilai

15.055.175,26 juta rupiah, atau nilai tersebut telah meningkat 1,5 kali dari tahun dasar (tahun 2010). Sedangkan indeks perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 120,48 persen atau senilai 12.227.201,29 juta rupiah atau 1,20 kalinya dari tahun dasar.

Tabel : 4.9. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (juta)	Indeks Perkembangan (%)	Nilai (juta)	Indeks Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	10.149.079,63	100,00	10.149.079,63	100,00
2011	11.373.376,27	112,06	10.597.723,01	104,42
2012	12.285.562,55	121,05	11.116.865,90	109,54
2013	13.544.646,54	133,46	11.712.504,85	115,40
2014	15.055.175,26	148,34	12.227.201,29	120,48

Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2014 kategori yang mengalami perkembangan tertinggi adalah kategori P, yaitu jasa pendidikan dengan angka indeks sebesar 239,82 persen atau nilai tambah bruto tahun 2014 naik 2,4 kali dibandingkan dengan tahun dasar. Disusul kategori Q, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan indeks perkembangan sebesar 181,81 persen atau nilai tambah bruto di tahun 2014 naik 1,8 kali dari tahun dasar. Disusul kategori C yaitu lapangan usaha industri pengolahan dengan indeks perkembangan sebesar 175,33 persen atau nilai tambah bruto kategori tersebut naik 1,8 kali dari tahun dasar. Sedangkan indeks perkembangan terendah adalah kategori E, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

yang tercatat 123,59 persen atau selama 4 tahun, kategori ini nilai tambah brutonya hanya meningkat sebesar 1,2 kalinya tahun dasar.

4.6 Indeks Berantai

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan per tahun baik secara agregat maupun per kategori yaitu dengan membuat tabel turunan yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Secara umum nilai indeks berantai diperoleh dari perbandingan nilai PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Bila nilai indeks berantai ini dikurangi 100 dikatakan sebagai laju pertumbuhan PDRB.

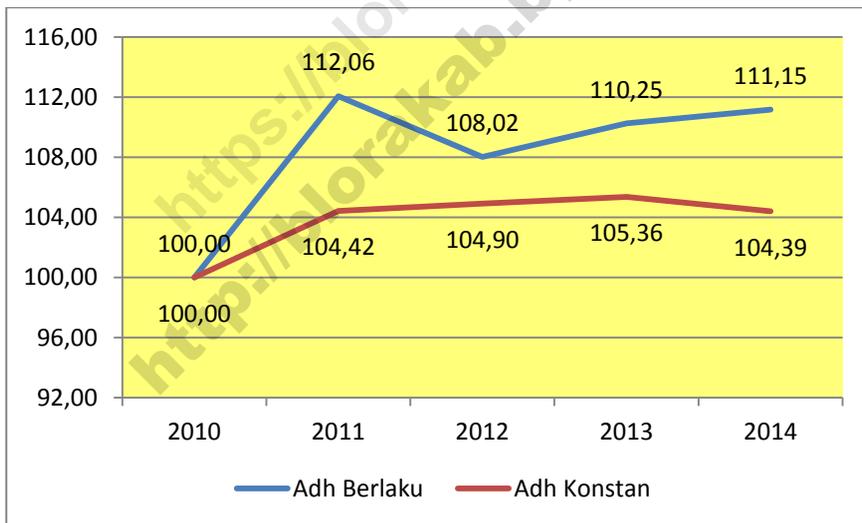
Indeks berantai menurut harga berlaku diperoleh dengan cara membagi NTB adh berlaku tahun (t) dengan NTB adh berlaku tahun (t-1). Nilai Indeks berantai menurut harga berlaku ini menggambarkan besarnya perkembangan agregat atau kategorial yang dikarenakan oleh adanya perkembangan harga dan produksi. Sedangkan Indeks berantai berdasarkan harga konstan diperoleh dengan cara membagi NTB adhk tahun (t) dengan NTB adhk tahun (t-1). Pergerakan indeks ini mencerminkan perkembangan nilai riil produksi masing-masing kategori, dengan demikian indeks berantai adalah juga merupakan laju pertumbuhan PDRB apabila indeks tersebut dikurangi 100.

Untuk harga berlaku, indeks berantai PDRB Kabupaten Blora tahun 2014 adalah sebesar 111,15 persen. Indeks berantai tertinggi dicapai oleh kategori C, yaitu lapangan usaha industri pengolahan yang tercatat sebesar 123,42 persen, disusul kategori Q, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan kategori H, transportasi dan komunikasi yang masing-masing tercatat sebesar 118,09 persen dan 117,94 persen dan

terkecil adalah kategori A, pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 101,12 persen.

Sedangkan menurut harga konstan, indeks berantai PDRB Kabupaten Blora tahun 2014 adalah sebesar 104,39 persen. Dengan indeks berantai tertinggi adalah kategori C, lapangan usaha industri pengolahan yang tercatat sebesar 114,46 persen, diikuti kategori J, informasi dan komunikasi yang tercatat sebesar 113,03 persen, diikuti lapangan usaha jasa pendidikan yang tercatat sebesar 112,76 persen dan terkecil adalah kategori A, pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 94,39 persen.

Gambar 4.6 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2014



4.7 Inflasi

Inflasi didefinisikan secara umum sebagai turunnya nilai mata uang (kebalikannya adalah deflasi). Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

BPS biasa menghitung inflasi menggunakan dua metode, *pertama* dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi, yang dihitung baik setiap bulan maupun setiap tahun, seperti yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. *Kedua*, inflasi dihitung dengan memakai indeks implisit PDRB yang disebut sebagai inflasi PDRB.

Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya pun berlainan. Untuk penghitungan inflasi dengan metode implisit dari PDRB dilakukan dengan rumus:

$$\text{Inflasi PDRB} = \left[\frac{\text{indek implisit tahun } t}{\text{indek implisit tahun } (t - 1)} - 1 \right] \times 100\%$$

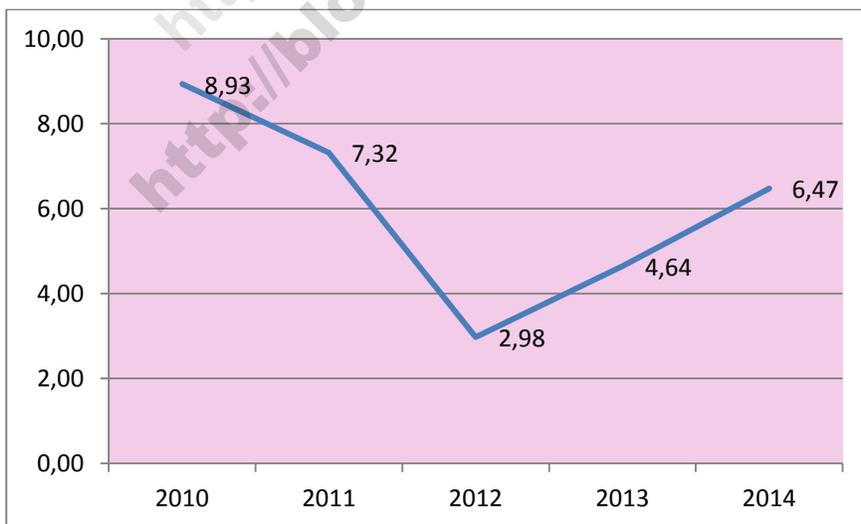
dimana:

$$\text{indeks implisit} = \frac{\text{NTB adh berlaku kategori } i}{\text{NTB adh konstan kategori } i} \times 100\%$$

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, kenaikan harga telah memicu inflasi PDRB. Kondisi ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB adh berlaku yang cukup tinggi akibat dipengaruhi faktor harga, tetapi disisi lain PDRB adh konstan pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari pertumbuhan indeks implisit PDRB, selama kurun waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Blora selalu mengalami inflasi dengan pergerakan yang cukup berfluktuasi pada kisaran 2,98 persen di tahun 2012 sampai 8,93 persen pada tahun 2010, seperti terlihat pada gambar 4.7. Inflasi PDRB tahun 2014 tercatat sebesar 6,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,64 persen. Inflasi PDRB yang cukup tinggi menandakan perekonomian Kabupaten Blora bergerak cukup dinamis walaupun disisi lain membuat kekuatiran bagi masyarakat secara umum.

**Gambar 4.7 Inflasi PDRB Kabupaten Blora
Tahun 2010 – 2014**



Pada tahun 2014, inflasi PDRB tertinggi terjadi pada kategori C, yaitu lapangan usaha pertambangan/penggalian yang tercatat sebesar 12,21 persen, diikuti kegiatan konstruksi dan pengadaan air, pengelolaan sampah yang masing-masing tercatat sebesar 9,98 persen dan 8,67 persen. Sedangkan yang terendah adalah lapangan usaha informasi komunikasi yang tercatat sebesar minus 4,06 persen.

4.8 Perkembangan PDRB Lapangan Usaha

4.8.1 Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penggerak utama perekonomian di Kabupaten Blora. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan yang besar dari kategori tersebut terhadap PDRB Kabupaten Blora. Di dalam penghitungan PDRB, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbagi dalam beberapa sub lapangan usaha, yakni sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, serta sub lapangan usaha perikanan. Pada tahun 2014 besarnya sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB tercatat sebesar 27,22 persen atau senilai 4.4098.504,71 juta rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 1,12 persen adh berlaku dan minus 5,61 persen adh konstan.

4.8.1.1 Sub Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Sub lapangan usaha ini terdiri dari kegiatan pertanian pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan sumbangan

terhadap PDRB sebesar 22,14 persen, dengan nilai 3.333.608,56 juta rupiah adh berlaku dan 2.566.442,49 juta rupiah adh konstan. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub kategori ini tercatat sebesar minus 6,66 persen. Pertumbuhan negatif dari sub kategori tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan PDRB kabupaten Blora, karena peran sub lapangan usaha ini cukup besar. Berikut gambaran output dari sub kategori ini yang terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pertanian Tanaman Pangan

Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi kendala bagi rencana peningkatan produk di kategori pertanian, terutama pada kegiatan tanaman pangan. Dengan kendala tersebut, strategi peningkatan hasil pertanian ditempuh melalui program intensifikasi pertanian. Program intensifikasi pertanian dilakukan salah satunya melalui program sapta usaha tani, yaitu: pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama, pengolahan pasca panen dan pemasaran.

Walaupun muncul kendala-kendala sebagaimana diatas, tetapi luasnya lahan pertanian menjadi faktor pendukung besarnya andil pertanian terhadap besaran PDRB Kabupaten Blora. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Lahan sawah	: 46.035.712 Ha.
2. Lahan tegal/kebun	: 26.188.515 Ha.
3. Hutan	: 90.416.520 Ha.
<hr/>	
Jumlah	: 162.640.747 Ha.

Luas lahan sawah yang mencapai 46 ribu hektar, setiap tahunnya bisa menghasilkan gabah sekitar 400 ribu ton. Sehingga peningkatan

nilai tambah bruto sub kategori ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan produksi gabah, walaupun hasil kategori pertanian lainnya tidak bisa diabaikan.

Luas lahan akan berpengaruh terhadap luas tanam dan luas panen. Sedangkan besarnya produksi pertanian sangat ditentukan oleh besaran luas panen.

Tabel : 4.10. Luas panen (Ha), Produksi (Ton) Padi dan Palawija Utama Kabupaten Blora tahun 2013-2014

Jenis Komoditi	2013		2014	
	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi	84.260	434.902	82.732	424.436
2. Jagung	45.571	228.430	47.199	245.085
3. Ubi Kayu	3.069	84.572	2.482	66.517
4. Kc Hijau	2.188	2.447	1.983	1.916
5. Kc. Tanah	2.394	3.609	2.184	3.231
6. Kedelai	2.824	5.205	6.079	15.269

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2015

Tabel 4.9 merupakan beberapa komoditas dominan untuk tanaman pangan seperti padi dan palawija. Pada tahun 2014 produksi padi mengalami penurunan, sedangkan produksi palawija ada yang naik seperti jagung dan kedelai, dan ada yang turun produksinya seperti ubi kayu, kacang hijau dan kacang tanah. Gabah kering giling pada tahun 2014 turun dari 434.902 ton menjadi 424.436 ton atau turun minus 2,41 persen. Penurunan ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, karena dari gabah sendiri memberikan *share* yang cukup besar.

Sedangkan untuk produksi palawija, produksi jagung naik tipis dari 228.430 ton menjadi 245.085 ton ditahun 2014. Ubi kayu pada tahun 2013 produksinya 82.626 ton turun menjadi 66.517 ton. Produksi kacang hijau turun hampir lima puluh persen dari tahun sebelumnya, kacang tanah turun sekitar sebelas persen tetapi kedelai naik hampir dua ratus persen dari tahun sebelumnya.

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Yang masuk ke dalam pertanian tanaman hortikultura yang banyak ditemui di Kabupaten Blora antara lain jenis sayuran: bawang merah, cabe, bayam, sawi, kangkung, ketimun, terong, tomat dan lainnya. Untuk buah-buahannya seperti mangga, pisang, jambu biji, jeruk, semangka, melon dan lainnya, sedangkan untuk jenis tanaman hias masih jarang ditemui budidayanya. Potensi tanaman hortikultura di Blora masih belum begitu berkembang.

Tabel : 4.11. Jumlah Tanaman, Produksi Tanaman Buah-buahan Utama di Kabupaten Blora tahun 2013-2014

Jenis Komoditi	2013		2014	
	Jumlah Tanaman (Pohon)	Produksi (Kw)	Jumlah Tanaman (Pohon)	Produksi (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mangga	524.831	289.925	577.917	310.710
2. Pisang	462.362	235.381	465.723	204.011
3. Pepaya	17.103	10.748	21.197	15.694
4. Jambu Air	6.756	3.031	6.893	2.305
5. Jambu Biji	12.149	5.797	15.224	5.275

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2015

Pada tahun 2014 produksi buah-buahan cukup bervariasi, ada yang meningkat ada yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Untuk mangga dan pepaya ada kenaikan masing-masing sebesar 7 persen dan 46 persen, sedangkan pisang, jambu air dan jambu biji produksinya turun masing-masing sebesar 13 persen, 24 persen dan 9 persen.

Tabel : 4.12. Luas panen, Produksi Tanaman Sayuran Utama di Kabupaten Blora tahun 2013-2014

Jenis Komoditi	2013		2014	
	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Kw)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bawang Merah	146	11.028	134	8.929
2. Cabe Besar	3.989	125.990	5.564	98.773
3. Cabe Rawit	714	20.661	876	17.500
4. Terung	255	15.964	254	9.538
5. Kacang Pjg	516	18.560	418	11.952

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2015

3. Perkebunan

Budidaya tanaman perkebunan di Kabupaten Blora tidak banyak macamnya, yang banyak ditemui antara lain adalah tebu, tembakau, kelapa, jambu mete dan empon-empon. Tapi dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang mulai budidaya tebu, salah satu pendorongnya karena di Blora baru saja didirikan pabrik gula di Kecamatan Todanan.

Tabel : 4.13. Luas/Jumlah Tanaman dan Produksi Tanaman Utama Perkebunan Di Kabupaten Blora tahun 2013-2014

Komoditi	2013		2014	
	Jml Tanaman Produktif (phn)	Produksi (Ton)	Jml Tanaman Produktif (phn)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Kelapa	730	141,96	476	131,61

Komoditi	2013		2014	
	Luas Tanam Produktif (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam Produktif (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Kapuk	289,8	107,08	272,6	87,19
2. Jambu Mete	639,7	305,18	612,7	214,25

Komoditi	2013		2014	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1. Tebu	2.998,6	15.976,2	3.833,0	19.612,8
2. Tembakau	298,1	245,1	824,6	760,4

Komoditi	2013	2014
	Produksi (kg)	Produksi (kg)
(1)	(2)	(3)
1. Lempuyang wangi	559.837	167.375
2. Kunyit	398.396	124.780
3. Lengkuas	1.010.400	132.807
4. Temulawak	599.048	60.970

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2015

Pada tabel 4.11 terlihat beberapa produksi tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Blora. Kondisi di tahun 2014 ada kecenderungan semua produk perkebunan produksinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun ada yang mengalami kenaikan seperti tebu dan tembakau. Dibandingkan dengan produksi tahun 2013, produksi kelapa turun sebesar minus 7 persen, jambu mete minus hampir 30 persen, sebaliknya tebu produksinya naik sekitar 23 persen.

4. Peternakan

Blora dikenal sebagai daerah potensi peternakan khususnya sapi potong. Disamping sapi potong, ternak lainnya juga banyak dipelihara oleh masyarakat Blora, seperti: kambing, domba maupun ayam, baik ayam ras maupun bukan ras. Sedangkan hasil peternakan lainnya antara lain adalah susu dan telur. Besarnya populasi ternyata tidak sebanding dengan nilai tambah brutonya. Sebagai contoh pertambahan berat sapi atau perkembangbiakan sapi, sangat lambat. Demikian juga dengan ternak-ternak lainnya. Hal ini terjadi karena sistem pemeliharaan ternak secara umum masih bersifat tradisional. Padahal didalam penghitungan nilai tambah bruto salah satu indikatornya antara lain produksi daging untuk ternak besar, kecil dan unggas dan produksi telur dan susu untuk produk ternak lainnya

Pada tabel 4.12 terlihat pada tahun 2014 hampir semua populasi ternak dan unggas mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 kecuali ayam ras pedaging. Tetapi ternak yang dipotong hampir semua mengalami penurunan, kecuali pada ayam ras pedaging. Sedangkan untuk produksi hasil-hasil peternakan lainnya yang terdiri dari telur dan

susu serta hasil peternakan lainnya mengalami penurunan, kecuali telur ayam kampung. Penurunan produksi telur ayam bahkan mencapai minus 42 persen.

Tabel : 4.14. Populasi Hewan Dan Hasil-hasil Utama Peternakan di Kabupaten Blora tahun 2013-2014

Jenis Komoditi	2013		2014	
	Jumlah	Dipotong	Jumlah	Dipotong
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hewan :				
1. Sapi Potong	198.806	4.732	199.584	4.269
2. Kambing	112.122	12.280	112.650	12.999
3. Domba	17.319	4.463	17.638	3.113
4. Ayam Kampung	2.004.614	1.057.142	4.117.761	1.048.031
5. Ayam Ras Pedaging	1.844.213	2.011.612	1.655.461	2.9.798
6. Itik	74.276	3.961	75.324	3.555
Hasil Peternakan :				
1. Susu (Liter)	23.675	-	23.677	-
2. Telur Ayam Kampung	21.449.651	-	25.297.828	-
3. Telur Ayam Ras	55.569.134	-	32.107.397	-
4. Telur Itik	2.650.669	-	2.651.311	-

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2015

5. Jasa Pertanian dan Perburuan

Jasa pertanian merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pertanian, baik pertanian padi palawija, hortikultura, perkebunan dan pertanian lainnya. Termasuk jasa pertanian antara lain jasa penanaman, jasa pemanenan hasil pertanian, jasa pengelolaan lahan, jasa persewaan alat pertanian, jasa pemberantasan hama serta jasa-jasa lainnya.

Sedangkan perburuan adalah kegiatan menangkap hewan liar, atau mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan liar, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

4.8.1.2 Sub Lapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu

Potensi kehutanan di Kabupaten Bloro didominasi oleh hutan negara yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bloro. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa areal hutan negara tidak/kurang produktif lagi sehingga kurang mampu meningkatkan output di sub kategori kehutanan. Terdapat tiga wilayah pemangku hutan yaitu KPH Randublatung, KPH Cepu dan KPH Bloro. Ketiga KPH tersebut bertugas mengawasi lokasi hutan negara di kecamatan yang menjadi tugasnya. Wilayah Kabupaten Bloro juga cocok dan cukup potensial untuk pengembangan hutan rakyat, karena struktur tanah dan iklimnya cukup mendukung. Kecamatan yang memiliki hutan rakyat antara lain: Jiken, Bogorejo, Jepon, Bloro, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan.

Produk kehutanan yang banyak dijumpai di Bloro antara lain kayu jati, kayu rimba dan kayu bakar baik produksi dari hutan negara maupun usaha budi daya masyarakat. Disamping kayu-kayuan termasuk produk kehutanan lainnya adalah bambu, arang, sarang burung walet maupun hasil kegiatan lainnya yang memanfaatkan hutan sebagai sarannya seperti penangkapan satwa liar di hutan maupun pengambilan daun jati oleh masyarakat termasuk juga pengambilan tanaman obat-obatan dari hutan.

Pada tahun 2014, nilai tambah bruto sub lapangan usaha kehutanan tercatat sebesar 752.886,61 juta rupiah adh berlaku, dengan andil terhadap PDRB Kabupaten sebesar 5,00 persen. Untuk harga konstan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 540.416,55 juta rupiah dengan andil terhadap PDRB Kabupaten sebesar 4,42 persen. Sub

lapangan usaha ini pada tahun 2014 tumbuh sebesar 12,36 persen adh berlaku dan minus 0,41 persen adh konstan. Selama dua tahun terakhir sub lapangan usaha ini selalu tumbuh negatif, dimana nilai pertumbuhan tahun 2014 ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar minus 1,81 persen. Terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sub lapangan usaha ini memberikan *share* sebesar 18,37 persen adh berlaku dan 17,34 persen adh konstan.

4.8.1.3 Sub Lapangan Usaha Perikanan

Selama ini sub kategori perikanan di Kabupaten Blora disumbang oleh budidaya perikanan kolam dan budidaya perikanan dari perairan umum, yang meliputi sungai, cek dam dan embung. Sedangkan sumbangan dari hasil budidaya perikanan dari waduk relatif masih sangat kecil karena hanya berasal dari Kecamatan Blora dan Tunjungan.

Tabel: 4.15 Luas Panen dan Produksi Ikan Hasil Budidaya di Kabupaten Blora, Tahun 2012 – 2014

Lokasi	2012		2013		2014	
	Luas Panen (ha)	Produksi (Kg)	Luas Panen (ha)	Produksi (Kg)	Luas Panen (ha)	Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kolam	18	290.120	28	688.055	3	308.730
Sungai	1.026	235.290	1.026	235.320	1.037	232.820
Waduk	70	32.092	70	32.110	79	26.500
Cek Dam & Embung	20	21.641	20	21.650	21	23.831

Sumbangan sub lapangan usaha perikanan terhadap PDRB Blora masih cukup kecil. Pada tahun 2014 sumbangan yang diberikan dari sub lapangan usaha ini tercatat sebesar 0,08 persen adh berlaku dengan nilai tambah bruto sebesar 12.009,54 juta rupiah adh berlaku dan 9.087,37 persen adh konstan. Pertumbuhan sub lapangan usaha ini pada tahun

yang sama tercatat sebesar 3,09 persen (adh konstan), dan lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,54 persen. Terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sub kategori ini memberikan *share* sebesar 0,36 persen adh berlaku dan 0,27 persen adh konstan.

4.8.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kategori B, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian terdiri atas 4 sub lapangan usaha. Untuk Kabupaten Blora hanya ada dua sub lapangan usaha, yaitu pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Penerapan SNA 2008 menambah cakupan di lapangan usaha ini, khususnya sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi. Sebelumnya nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini hanya minyak mentah, tetapi dengan penerapan SNA 2008 cakupannya bertambah tidak hanya dalam bentuk minyak bumi maupun gas tetapi aktifitas yang berkaitan dengan pembentukan modal tetap bruto dan evaluasi barang tambang juga dihitung sebagai output sebagai dasar penghitungan nilai tambah bruto. Sehingga nilai tambah bruto nilainya cukup besar dibandingkan dengan tahun dasar 2000.

Sumbangan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2014 tercatat sebesar 14,64 persen (adh berlaku), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,80 persen. Nilai tambah lapangan usaha ini tercatat sebesar 2.203.453,30 juta rupiah adh berlaku dan 1.779.359,69 juta rupiah adh konstan, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 5,08 persen (adh konstan), melambat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,44 persen.

4.8.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi outputnya evaluasi dan eksplorasi barang tambang serta belanja modal atau pembentukan modal tetap bruto dalam kegiatan pertambangan. Merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai kegiatan pertambangan minyak bumi. Selain minyak bumi, Kabupaten Blora juga memiliki potensi gas alam, tetapi sampai saat ini belum produksi secara komersial. Pada tahun 2014 adh berlaku sub lapangan usaha ini memberikan sumbangan sebesar 12,60 persen dengan nilai tambah bruto sebesar 1.896.474,17 juta rupiah. Sedangkan *share* terhadap kategorinya, sub lapangan usaha ini memberikan andil sebesar 86,07 persen adh berlaku dan 87,11 persen adh konstan.

4.8.2.2 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Berikutnya adalah sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Blora, sub lapangan usaha ini hanya ada kegiatan penggalian terutama penggalian golongan C seperti pasir, batu dan tanah urug. Sebenarnya Blora punya potensi yang cukup besar, tetapi pemanfaatan dan pengelolaannya belum sesuai apa yang diharapkan. Jenis bahan galian belum banyak dieksploitasi secara optimal dan diperkirakan mempunyai cadangan yang cukup besar dan potensi yang cukup tinggi. Beberapa jenis komoditi sub kategori penggalian tersebar di beberapa kecamatan dengan potensinya antara lain :

Sirtu : Kecamatan Kradenan, Ngawen dan Cepu.

Pasir kuarsa : Kecamatan Todanan, Japah, Tunjungan, Bogorejo, dan Kecamatan Jepon.

Batu Pasir : Kecamatan Japah, Tunjungan dan Todanan

- Tanah liat** : Kecamatan Blora dan Todanan
- Gipsum** : Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Bogorejo dan Kecamatan Cepu.
- Phospat** : Kecamatan Todanan.
- Kalsit** : Kecamatan Todanan.
- Ball Clay** : Kecamatan Todanan, Tunjungan, Bogorejo.
- Batu Gamping** : Kecamatan Randublatung, Kradenan, Sambong, Japah, Tunjungan, Bogorejo, Jepon, Jiken dan Kecamatan Todanan.

Nilai tambah bruto sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya pada tahun 2014 tercatat sebesar 306.979,13 juta rupiah adh berlaku, memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 2,04 persen. Sedangkan adh konstan tercatat sebesar 229.412,99 juta rupiah. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub lapangan usaha ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,05 persen (adh konstan). Sumbangan sub lapangan usaha ini masih kecil, karena yang di eksploitasi baru galian golongan C (pasir/batu/koral/tanah urug), padahal di sisi lain galian ini sumber daya alamnya sudah mulai menipis, bahkan sudah semakin sulit didapat.

4.8.3 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Industri: adalah suatu unit produksi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan baku/bahan mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Untuk lebih memudahkan dalam memahami angka-angka yang ditampilkan dalam kategori ini, BPS Kabupaten Blora mengacu pada konsep dan definisi yang dibakukan

oleh BPS Pusat, dimana konsep tentang industri di kelompokkan atau digolongkan menjadi empat.

Kriteria industri sebagai berikut:

1. Industri Besar : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja paling sedikit 100 orang.
2. Industri Sedang : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 20 - 99 orang.
3. Industri Kecil : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 5 - 19 orang.
4. Industri RT : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 1 - 4 orang.

Perubahan tahun dasar 2000 menjadi tahun 2010 mengaplikasikan SNA 2008. Penerapan ini berdampak pada peningkatan level PDRB, karena ada perubahan konsep, penambahan cakupan dan perbaikan data. Perubahan konsep contohnya hasil industri yang dikonsumsi sendiri ikut diperhitungkan nilainya sebagai output. Penambahan cakupan contohnya masuknya industri pengilangan migas walaupun sifatnya hanya sebagai bahan studi. Perbaikan data contohnya untuk industri pengolahan tembakau, cukai yang diberikan dimasukkan sebagai output pada industri tersebut, dan lain sebagainya.

Dengan SNA 2008, lapangan usaha industri pengolahan meliputi 16 sub lapangan usaha yaitu: industri batubara dan pengilangan minyak; industri makanan, minuman, industri tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu, gabus, anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;

industri kertas dan barang dari kertas, percetakan; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; industri logam dasar; industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; industri furniture; dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.717.341,09 juta rupiah adh berlaku, memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 11,41 persen. Sedangkan menurut harga konstan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 1.341.483,13 juta rupiah dan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,97 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sumbangan terhadap PDRB tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Sedangkan pertumbuhan sub kategori industri pengolahan tercatat sebesar 23,42 persen adh berlaku dan 14,46 persen adh konstan.

Berikut ini adalah jenis industri yang cukup dominan di Kabupaten Blora, antara lain: industri makanan dan minuman. Pada tahun 2014 mempunyai kontribusi terhadap lapangan usaha industri pengolahan sebesar 48,80 persen adh berlaku atau senilai 838.029,50 juta rupiah dan 48,14 persen adh konstan atau senilai 645.771,03 juta rupiah. Dan pada tahun yang sama nilai tambah brutonya tercatat sebesar 17,82 persen, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kegiatan yang masuk dalam industri makanan dan minuman beberapa diantaranya adalah industri tahu tempe, industri roti, industri krupuk dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah industri pengolahan tembakau. Industri ini pada tahun 2014 memiliki nilai tambah bruto sebesar 390.862,33 juta

rupiah adh berlaku dan 296.643,87 juta rupiah adh konstan, dan memberikan kontribusi terhadap lapangan usahanya sebesar 22,76 persen (adh berlaku). Dan pertumbuhan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 22,55 persen.

Industri kayu, barang dari kayu, gabus, barang dari anyaman bambu, rotan dan sejenisnya merupakan industri dominan yang ketiga yang ada di Kabupaten Blora. Industri ini pada tahun 2014 mempunyai kontribusi di lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,39 persen adh berlaku dan 10,07 persen adh konstan. Dengan nilai tambah bruto sebesar 178.513,62 juta rupiah adh berlaku dan 135.050,16 adh konstan. Serta pada tahun yang sama tercatat tumbuh sebesar 8,01 persen.

Dan Industri barang galian bukan logam diurutkan berikutnya. Pada tahun 2014 mempunyai sumbangan terhadap lapangan usahanya sebesar 3,73 persen adh berlaku dan 3,76 persen adh konstan. Dengan nilai tambah bruto tercatat sebesar 63.975,21 juta rupiah adh berlaku dan 50.464,63 adh konstan. Yang termasuk industri barang galian bukan logam antara lain: industri batu bata, genteng, gerabah dari tanah dan lain sebagainya.

4.8.4 Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha ini terbagi menjadi dua sub lapangan usaha, sub lapangan usaha ketenagalistrikan dan sub lapangan usaha pengadaan gas dan produksi es. Penghitungan nilai tambah bruto ketenagalistrikan adalah listrik yang terjual dikurangi dengan subsidi yang diterima, sedangkan pengadaan gas tidak dijumpai di Blora, yang ada pada sub lapangan usaha ini hanya produksi es.

Pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas pada tahun 2014 tercatat sebesar 3,95 persen *adh* berlaku dan 3,22 persen *adh* konstan. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2014 masih rendah, tercatat sebesar 0,06 persen *adh* berlaku dan 0,08 persen *adh* konstan. Meskipun sumbangan dari kategori ini terhadap PDRB relatif kecil, tetapi merupakan lapangan usaha yang sangat vital untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

**Tabel : 4.16. Jumlah Pelanggan Listrik PLN
Di Kabupaten Blora Tahun 2010–2014**

Tahun	Listrik PLN
(1)	(2)
2010	172.831
2011	177.662
2012	199.753
2013	206.743
2014	216.045

Peningkatan jumlah pelanggan listrik berdampak positif pada pertumbuhan di sub lapangan usaha ketenagalistrikan. Dan semakin banyak pelanggan, listrik yang terjual akan semakin besar. Kondisi tersebut akan meningkatkan nilai tambah bruto pada kegiatan tersebut. Pada tahun 2014, nilai tambah bruto sub lapangan usaha ketenagalistrikan *adh* berlaku tercatat sebesar 9.560,64 juta rupiah dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,85 persen. Dan nilai untuk harga konstan tercatat sebesar 10.133,62 juta rupiah dan tumbuh sebesar 3,19

persen. Kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 98,31 persen *adh* berlaku dan 98,85 persen *adh* konstan.

Untuk sub lapangan usaha pengadaan gas dan produksi es kontribusinya masih sangat kecil baik terhadap PDRB kabupaten maupun terhadap lapangan usahanya. Pada tahun 2014, sumbangan sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 1,69 persen *adh* berlaku dan 1,15 persen *adh* konstan. Dengan nilai tambah bruto sebesar 164,50 juta rupiah *adh* berlaku dan 117,60 juta rupiah *adh* konstan.

4.8.5 Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

Penerapan SNA 2008 memecah sektor listrik, gas dan air bersih menjadi lapangan usaha pengadaan listrik, gas dan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dan penerapan ini dimulai tahun 2010 bersamaan dengan perubahan tahun dasar baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam lapangan usaha ini antara lain pengadaan ir bersih dari PDAM, pamsimas dan pengadaan air swasta lainnya. Disamping itu kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang. Tetapi dari semua kegiatan di atas, hanya dari PDAM yang datanya bisa diperoleh dengan baik, selebihnya hanya melalui estimasi beberapa data pendukung.

Pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2014 tercatat sebesar 13,98 persen *adh* berlaku dan 4,89 persen *adh* konstan. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2014 masih rendah, tercatat hanya sebesar 0,05 persen *adh* berlaku dan 0,05 persen *adh*

konstan. Meskipun sumbangan dari kategori ini terhadap PDRB relatif kecil, tetapi merupakan lapangan usaha yang cukup vital untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Tabel : 4.17. Jumlah Pelanggan PDAM Di Kabupaten Blora Tahun 2010–2014

Tahun	P D A M
(1)	(2)
2010	10.422
2011	10.882
2012	11.464
2013	12.926
2014	13.671

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PDAM, dan kecenderungan setiap tahun jumlah pelanggan PDAM terus meningkat. Pada tahun 2014, jumlah pelanggan PDAM meningkat sebesar 5,76 persen, yang berimbas pada nilai tambah bruto di lapangan usaha ini. Sedangkan untuk penghitungan kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang sifatnya masih sangat kasar, karena ketidaktersediaan data oleh dinas/instansi atau lembaga. Disisi lain kegiatan pencatatan untuk tersebut juga masih sangat lemah.

Perluasan jaringan pada daerah yang sering dilanda kekurangan air bersih pada saat musim kemarau diharapkan akab bisa menambah nilai tambah bruto, tetapi disisi lain sering muncul kendala terutama pada ketersediaan air baku, dimana pada musim kemarau pada beberapa waduk di Kabupaten Blora yang menjadi air baku PDAM debit airnya

menurun bahkan ada yang mengalami kekeringan, akibatnya jumlah pemakaian air oleh masyarakat juga ikut menurun.

4.8.6 Lapangan Usaha Bangunan/Konstruksi

Kegiatan konstruksi diprediksi akan terus tumbuh cukup baik dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia akan infrastruktur yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal, kebutuhan pengusaha akan tempat usaha dan program-program pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana umum, baik jalan, jembatan maupun gedung dan konstruksi lainnya.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini masih didominasi kegiatan konstruksi swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah prosentase masih lebih rendah. Tetapi walaupun demikian peran pemerintah sebagai pendorong pembangunan melalui pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan tidak bisa diabaikan. Belanja modal pemerintah daerah untuk kegiatan konstruksi tahun 2014 meningkat 15,80 persen, dari 237,23 milyar rupiah menjadi 272,39 milyar rupiah. Hampir seperempat dari output konstruksi selama tahun tersebut.

Pada tahun 2014 lapangan usaha bangunan tumbuh 6,01 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,96 persen. Dengan nilai tambah bruto 650.405,34 adh berlaku dan 518.719,99 juta rupiah adh konstan. Kontribusi lapangan usaha ini tahun 2014 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 4,12 persen di tahun 2013 menjadi 4,32 persen adh berlaku, sedangkan adh konstan

kontribusi terhadap PDRB meningkat dari 4,18 persen di tahun 2013 menjadi 4,24 persen pada tahun 2014.

4.8.7 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha ini terdiri atas dua sub lapangan usaha perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya dan sub lapangan, yaitu: usaha perdagangan besar dan eceran. Perhitungan nilai tambah bruto (ntb) lapangan ini memakai metode arus barang yaitu dengan cara menghitung besarnya nilai komoditi lapangan usaha pertanian, industri, penggalian dan barang/jasa yang diperdagangkan dari luar wilayah Kabupaten Blora. Metode arus barang yang digunakan pada saat ini masih dipertahankan karena belum ada metode lain yang lebih representatif. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang cukup potensial karena kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini menduduki peringkat kedua setelah kategori pertanian.

Pada tahun 2014, nilai tambah bruto lapangan usaha ini adh berlaku tercatat sebesar 2.513.888,45 juta rupiah dengan share terhadap PDRB Kabupaten tercatat sebesar 16,70 persen. Sedangkan adh konstan di tahun yang sama, nilai tambahnya sebesar 2.233.698,83 juta rupiah dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 6,86 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,31 persen.

4.8.7.1 Sub Lapangan Usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Perkembangan tingkat kemakmuran penduduk biasanya diiringi dengan penambahan akan kepemilikan kendaraan bermotor, selain yang untuk kegiatan usaha. Dari tabel dibawah terlihat perkembangan jumlah kendaraan yang cenderung terus bertambah, apalagi sepeda motor. Nilai

tambah bruto sub lapangan usaha ini adalah margin dari perdagangan kendaraan bermotor dan jasa reparasinya.

Tabel : 4.18. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Blora Tahun 2010–2014

Jenis	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mobil penumpang	6.385	7.618	8.532	9.716	10.636
2. Mobil beban	5.361	5.575	5.976	6.539	7.173
3. Bus/Micro bus	365	383	424	462	489
4. Sepeda motor	183.269	187.903	208.440	233.104	259.868
Jumlah	195.380	201.479	223.372	249.821	278.166

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2015

Kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya di tahun 2014 tercatat sebesar 30,09 persen adh berlaku dengan nilai tambah brutonya sebesar 756.425,21 juta rupiah. Untuk harga konstannya, kontribusi kategori ini terhadap PDRB tercatat sebesar 25,95 persen dengan nilai tambah bruto sebesar 579.690,25 juta rupiah. Sedangkan pertumbuhan di tahun 2014, tercatat sebesar 8,52 persen adh berlaku dan 6,86 persen adh konstan.

4.8.7.2 Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Sub lapangan usaha ini pada tahun 2014 memiliki nilai tambah bruto sebesar 1.757.463,24 juta rupiah adh berlaku dan 1.654.008,58 juta rupiah adh konstan, dengan kontribusi terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 69,91 persen adh berlaku dan 74,05 persen adh

konstan. Pertumbuhan nilai tambah bruto adh konstan tercatat sebesar 6,29 persen.

Nilai tambah bruto diperoleh dari margin barang yang diperdagangkan dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan/penggalian dan lapangan industri pengolahan serta margin barang perdagangan yang berasal dari luar wilayah. Sehingga pertumbuhan sub lapangan usaha ini disamping karena pertumbuhan lapangan usaha primer ditambah lapangan usaha industri pengolahan, juga sangat dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk, kemampuan daya beli dan gaya hidup masyarakat.

4.8.8 Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha angkutan dan pergudangan terdiri atas enam sub lapangan usaha, yaitu sub lapangan usaha angkutan rel, angkutan darat, sub lapangan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir, sedangkan yang tidak ada kegiatannya di Blora adalah sub lapangan usaha angkutan laut dan angkutan udara.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2014 tercatat sebesar 415.625,22 juta rupiah adh berlaku dan 381.365,59 juta rupiah adh konstan atau tumbuh sebesar 10,57 persen. Sumbangan kategori ini terhadap PDRB tercatat sebesar 2,76 persen adh berlaku dan 3,12 persen adh konstan.

4.8.8.1 Sub Lapangan Usaha Angkutan Rel

Angkutan transportasi darat saat ini dikembangkan dengan 2 jenis moda angkutan, yaitu moda angkutan jalan raya dan moda angkutan jalan rel/kereta api. Perkembangan perkeretaapian terus berjalan

termasuk dalam rancang bangun, teknologi komunikasi dan informasi, dan teknologi bahan. Hal ini membawa pula perkembangan sarana dan prasarana kereta api. Wilayah Blora dilalui oleh angkutan kereta api, utamanya di kecamatan-kecamatan sebelah selatan, yaitu Kecamatan Jati, Randublatung, Kedungtuban dan Cepu. Ada perbaikan pelayanan kereta api akhir-akhir ini, sehingga peminat angkutan ini terus bertambah.

Tabel : 4.19. Jumlah Penumpang Kereta Api Di Kabupaten Blora Tahun 2010–2014

No	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
3	2010	184.055
4	2011	191.514
5	2012	147.725
6	2013	146.666
7	2014	196.266

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2015

Pada tahun 2014, nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini tercatat sebesar 11.3694,91 juta rupiah adh berlaku dan 6.924,18 adh konstan, dengan *share* terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 2,74 persen adh berlaku dengan pertumbuhan sebesar 38,74 persen adh konstan.

4.8.8.2 Sub Lapangan Usaha Angkutan Darat

Sub lapangan usaha angkutan darat terdiri atas angkutan orang dan barang seperti angkutan bus/mini bus, angkutan truk dan angkutan orang dan barang lainnya. Peran angkutan ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur

terutama jalan, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kegiatan ini. Tetapi disisi lain ada kendala-kendala yang ditemui dalam perjalanannya, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan komponen atau suku cadang kendaraan bermotor.

Pada tahun 2014 lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 10,07 persen adh konstan, dengan nilai tambah bruto sebesar 392.421,97 juta rupiah adh berlaku dan 365.109,81 juta rupiah adh konstan. Sedangkan kontribusi terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 94,42 persen adh berlaku.

4.8.8.3 Sub Lapangan Usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Sub Lapangan Usaha Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir

Sub lapangan usaha penyeberangan di Kabupaten Blora ada di Kecamatan Kedungtuban dan Kradenan, berupa penyeberangan sungai bengawan solo. Sedangkan lainnya berupa angkutan wisata yang ada di waduk Tempuran dan waduk Greneng. Sumbangan sub lapangan usaha ini pada tahun 2014 hanya sebesar 0,07 persen (adh berlaku) terhadap lapangan usahanya dengan nilai tambah bruto sebesar 270,23 juta rupiah adh berlaku dan 208,38 juta rupiah adh konstan.

Sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir terdiri atas persewaan gudang, terminal, jasa pos dan giro serta kegiatan jasa pengiriman barang. Pada tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap lapangan usahanya sebesar 2,78 persen adh berlaku dengan nilai tambah bruto sebesar 11.538,12 juta rupiah adh berlaku serta sebesar 9.123,23 juta rupiah adh konstan.

Meskipun kategori angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi relatif kecil terhadap total PDRB namun berperan cukup

penting terhadap kelancaran kegiatan perekonomian Kabupaten Bora khususnya dalam kelancaran distribusi barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

4.8.9 Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terdiri atas dua sub lapangan usahanya, yaitu sub lapangan usaha akomodasi dan sub lapangan usaha penyediaan makan minum. Pada tahun 2014 nilai tambah bruto lapangan usaha ini tercatat sebesar 515.685,80 juta rupiah *adh berlaku* dan 453.923,85 *adh konstan*, dan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,43 persen (*adh berlaku*). Pemilihan anggota dewan dan pemilihan presiden cukup mendorong lapangan usaha tersebut bisa tumbuh dengan baik, tercatat sebesar 9,00 persen di tahun 2014.

Sub lapangan usaha penyediaan akomodasi didominasi oleh kegiatan perhotelan. Jumlah hotel di Kabupaten Bora ada sekitar 32 hotel, yang terdiri atas 4 hotel berbintang dan 28 hotel non bintang. Nilai tambah brutonya dihitung berdasarkan jumlah malam menginap tamu hotel. Pada tahun 2014 nilai tambah bruto *adh berlaku* sub lapangan usaha penyediaan akomodasi tercatat sebesar 22.053,72 juta rupiah *adh berlaku* dan 15.773,64 juta rupiah *adh konstan*, dengan kontribusi terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 4,28 persen (*adh berlaku*). Sedangkan pertumbuhan sub lapangan usaha ini pada tahun yang sama tercatat sebesar 10,63 persen (*adh konstan*).

Sub lapangan usaha penyediaan makan minum terdiri dari kegiatan restoran, rumah makan, kedai makan minum termasuk kegiatan perdagangan makanan keliling. Nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini di tahun 2014 tercatat sebesar 493.632,08 juta rupiah *adh berlaku* dan

438.150,21 juta rupiah adh konstan, dengan kontribusi terhadap kategorinya tercatat sebesar 95,72 persen (adh berlaku) dan dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 8,95 persen (adh konstan).

4.8.10 Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan orang dengan cepat mengetahui berita dan dengan cepat pula mengirimkan berita, jadi terciptalah komunikasi yang efektif. Kini teknologi informasi komunikasi memperpendek waktu secara lebih drastis. Suatu berita dapat mencapai keseluruhan dunia dalam waktu beberapa menit lewat berita yang cepat dari berbagai penemuan. Demikianlah teknologi informasi mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Teknologi informasi menyebabkan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah. Dan juga menyebabkan informasi tentang keadaan konsumen, harga bahan mentah dan keadaan pasar di semua negara dapat diketahui dengan mudah dan cepat.

Pada tahun 2014 lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,10 persen (adh berlaku) dengan nilai tambah bruto sebesar 166.227,55 juta rupiah dan 383.015,37 juta rupiah adh konstan, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 13,03 persen adh konstan.

4.8.11 Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha ini terdiri dari beberapa sub lapangan usaha yaitu sub lapangan usaha jasa perantara keuangan, sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun, sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya dan sub lapangan usaha jasa penunjang keuangan. Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2014 tercatat sebesar 486.846,28 juta rupiah adh berlaku dan 383.015,37 juta rupiah adh konstan.

Pertumbuhan kategori ini pada tahun tersebut sebesar 6,99 persen (adh konstan), sedangkan sumbangan terhadap PDRB sebesar 3,23 persen (adh konstan).

- **Sub lapangan usaha jasa perantara keuangan.** Kegiatan yang termasuk dalam sub lapangan usaha ini adalah kegiatan perbankan termasuk bank perkreditan rakyat. Nilai tambah sub lapangan usaha ini pada tahun 2014 tercatat sebesar 360.540,52 juta rupiah adh berlaku dan 276.717,06 juta rupiah adh konstan sehingga memberi kontribusi terhadap lapangan usahanya sebesar 74,06 (adh berlaku). Dengan pertumbuhan yang bagus, yaitu sebesar 5,17 persen (adh konstan). Pertumbuhan positif ini menggambarkan roda perekonomian di Kabupaten Blora masih cukup bagus, yang terlihat dari besaran kredit yang dikeluarkan oleh perbankan yang terus meningkat.

- **Sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun.** Yang termasuk dalam sub lapangan usaha ini adalah kegiatan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi lainnya (asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan lainnya), serta lembaga dana pensiun yang diselenggarakan oleh perbankan maupun oleh lembaga asuransi. Peran sub lapangan usaha ini masih cukup kecil baik terhadap lapangan usahanya maupun terhadap total PDRB. Pada tahun 2014 nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini sebesar 3.378,04 juta rupiah adh berlaku dan 2.884,37 juta rupiah adh konstan. Kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahannya tercatat sebesar 0,69 persen (adh berlaku).

- **Sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya.** Sub lapangan usaha ini antara lain adalah koperasi simpan pinjam, pegadaian, lembaga

pembiayaan, *leasing* dan jasa keuangan lainnya. Pada tahun 2014 kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 25,25 persen (adh berlaku), dengan nilai tambah bruto tercatat sebesar 122.921,39 juta rupiah adh berlaku dan 103.408,78 juta rupiah adh konstan. Dan tumbuh sebesar 11,92 persen (adh konstan).

- **Sub kategori jasa penunjang keuangan**, terdiri atas kegiatan *money changer*, agen asuransi, *debt collector* dan lainnya. Pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 14,29 persen (adh konstan). Dengan nilai tambah bruto sebesar 6,33 juta rupiah adh berlaku dan 5,16 juta rupiah adh konstan, sehingga kontribusi sub lapangan usaha ini sangatlah kecil baik terhadap lapangan usahanya maupun terhadap PDRB.

4.8.12 Lapangan Usaha Real Estate

Dengan penerapan SNA 2008, kegiatan real estate menjadi lapangan usaha sendiri, dimana sebelumnya merupakan bagian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Lapangan usaha ini didominasi oleh kepemilikan properti yang dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan properti oleh rumah tangga dihitung sebagai output, sesuai konsep *Owner Occupied Dwelling* (OOD), yaitu mengestimasi output properti yang digunakan oleh rumah tangga sendiri. Selain itu persewaan properti seperti bangunan tempat tinggal dan bangunan untuk usaha juga masuk di dalam lapangan usaha ini.

Pada tahun 2014 kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB tercatat sebesar 1,37 persen (adh berlaku), dengan nilai tambah bruto tercatat sebesar 206.964,44 juta rupiah adh berlaku dan 191.350,14 juta rupiah adh konstan. Dan tumbuh sebesar 8,82 persen (adh konstan).

4.8.13 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan

Kegiatan yang masuk dalam lapangan usaha ini antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa ahli, tehnis dan jasa bisnis lainnya, jasa persewaan (persewaan alat pesta, persewaan alat-alat pertanian dan sebagainya), juga jasa pendukung lainnya seperti jasa penyaluran tenaga kerja, biro perjalanan wisata, jasa fotocopy dan lain sebagainya.

Pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 10,60 persen (adh konstan). Dengan nilai tambah bruto sebesar 44.499,21 juta rupiah adh berlaku dan 37.687,76 juta rupiah adh konstan, sehingga kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,30 persen (adh berlaku).

4.8.14 Lapangan Usaha Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Belanja pemerintah terdiri atas gaji dan belanja rutin lainnya, masuk sebagai nilai tambah lapangan usaha ini. Belanja yang dimaksud tidak hanya belanja pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi) saja, tetapi juga belanja instansi/lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah.

**Tabel : 4.20. Realisasi APBD Kabupaten Blora
Tahun 2013–2014**

Rincian <i>Item</i>	2013	2014
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.292.799.169.613	1.516.557.364.380
1. Pendapatan Asli Daerah	95.192.786.972	144.798.225.775
2. Dana Perimbangan	901.824.680.069	1.291.175.772.181
3. Lain Pendapatan yang Sah	295.781.702.572	80.583.366.424

B. Belanja	1.318.484.054.214	1.404.688.344.000
- Belanja Pegawai	778.872.858.636	856.040.815.377
- Belanja Barang Jasa	140.523.045.846	107.977.547.117
- Belanja Modal	260.455.399.862	328.500.393.240
- Belanja Bunga	41.044.113	14.713.538
- Belanja Subsidi	0	0
- Belanja Hibah	52.420.935.000	47.601.679.800
- Belanja Bagi Hasil	0	0
- Belanja Bantuan Keuangan	81.971.270.757	60.590.694.928
- Belanja Bantuan Sosial	4.199.500.000	3.962.500.000
- Belanja Tidak Terduga	0	0

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2015

Pada tahun 2014 nilai tambah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tercatat sebesar 573.232,85 juta rupiah adh berlaku dan 456.716,05 adh konstan. Sumbangan terhadap PDRB tercatat sebesar 3,81 persen (adh berlaku) dan pada tahun yang sama lapangan usaha ini tumbuh sebesar 2,04 persen (adh konstan).

4.8.15 Lapangan Usaha Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan dimana untuk penghitungan PDRB tahun dasar 2000 yang dihitung hanya untuk kegiatan jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta, tetapi dengan penerapan SNA 2008 jasa pendidikan yang dihitung tidak hanya yang dikelola oleh swasta, tetapi dana-dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah untuk kegiatan pendidikan swasta juga ikut dihitung nilai tambahnya.

Wajib belajar 12 tahun dan amanat undang-undang yang mewajibkan 20 persen APBN untuk pendidikan sangat berdampak pada

level PDRB. Peran atau sumbangan lapangan usaha ini terhadap PDRB naik secara signifikan.

Tabel : 4.21. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Blora Tahun 2013–2014

Kecamatan <i>District</i>	Sekolah <i>School</i>		Murid <i>Students</i>		Guru <i>Teacher</i>	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	PN PNS	Non PNS
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	654	217	116.306	37.382	5.504	4.873
2013	654	218	114.010	45.332	5.655	6.461
2014	651	225	112.260	40.718	5.092	6.247

Nilai tambah bruto lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2014 tercatat sebesar 971.762,09 juta rupiah adh berlaku dan 729.250,66 juta rupiah adh konstan, sumbangan lapangan usaha ini terhadap PDRB sebesar 6,45 persen (adh berlaku) dan pertumbuhan nilai tambah bruto pada tahun yang sama sebesar 12,76 persen (adh konstan).

4.8.16 Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Pembangunan tidak akan mungkin berhasil tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan selama beberapa dekade terakhir diakui cukup berhasil, terutama pembangunan infrastruktur kesehatan yang telah menyentuh hampir seluruh kecamatan bahkan sampai pedesaan.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini terdiri atas kegiatan jasa kesehatan rumah sakit, balai pengobatan, dokter dan bidan serta pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2014 pertumbuhan nilai tambah kegiatan ini tercatat sebesar 12,19 persen (adh konstan), dengan nilai tambah bruto sebesar 144.177,12 juta rupiah adh berlaku dan 115.090,34 juta rupiah adh konstan. Sumbangan kegiatan ini terhadap PDRB adalah sebesar 0,96 persen (adh berlaku).

4.8.17 Lapangan Usaha Jasa Lainnya

Lingkup kegiatan lapangan usaha jasa lainnya sangat banyak, antara lain:

- a. Jasa kesenian hiburan dan rekreasi, yang terdiri dari kegiatan seni pertunjukan, kegiatan pekerja seni, kegiatan hiburan, kegiatan pariwisata, taman budaya, taman nasional, kegiatan olah raga, dan lain sebagainya.
- b. Jasa reparasi barang-barang rumah tangga, antara lain: reparasi elektronik, reparasi perabot rumah tangga, reparasi perhiasan dan lain sebagainya.
- c. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, seperti salon kecantikan, tukang pangkas rambut, laundry, jasa permak pakaian dan lain sebagainya.

Pada tahun 2014 nilai tambah bruto kegiatan ini tercatat sebesar 329.946,42 juta rupiah adh berlaku dan 290.400,80 juta rupiah adh konstan. Sedangkan pertumbuhan kegiatan ini pada tahun 2014 tercatat sebesar 10,49 persen (adh konstan). Dan andil lapangan usaha ini terhadap PDRB Tercatat sebesar 2,19 persen (adh berlaku).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada perubahan yang cukup signifikan pada PDRB pada perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, akibat penerapan SNA 2008. Perubahan konsep, definisi, penambahan cakupan dan perbaikan harga beberapa komponen, menyebabkan PDRB tahun dasar baru memiliki level yang lebih tinggi dari PDRB lama yang menggunakan tahun dasar 2000.

Besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2014, tercatat sebesar 15.055.175,26 juta rupiah atau terjadi pertumbuhan sebesar 11,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi yang tercatat sebesar 23,42 persen, kemudian disusul oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami pertumbuhan sebesar 18,09 persen dan lapangan usaha transportasi pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 17,94 persen. Selanjutnya pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 1,12 persen.

Atas dasar harga konstan (2010=100), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora tahun 2014 tercatat sebesar 4,39 persen, atau senilai 12.227.201,29 juta rupiah. Lapangan usaha industri pengolahan memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 14,46 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,03 persen dan lapangan usaha jasa pendidikan

yang tumbuh sebesar 12,76 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar minus 5,61 persen.

Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2014 sumbangan terbesar untuk PDRB masih dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 27,22 persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan motor yang tercatat sebesar 16,70 persen dan diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memberikan andil sebesar 14,64 persen serta lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11,41 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yakni sebesar 0,05 persen.

Atas dasar harga konstan, andil terbesar pada PDRB tahun 2014 masih dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, tercatat sebesar 25,48 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan andil sebesar 18,27 persen, disusul lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memberikan sumbangan sebesar 14,55 persen. Andil terkecil diberikan oleh pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,05 persen.

Inflasi PDRB tahun 2014 tercatat sebesar 6,47 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,64 persen, hal ini menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang cukup tinggi terjadi di tahun 2014.



TABEL POKOK

<https://blorakab.bps.go.id>
<http://blorakab.bps.go.id>



Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2014
 (JUTAAN RUPIAH)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.133.789,45	3.379.046,42	3.642.119,11	4.053.079,36	4.098.504,71
B	Pertambangan dan Penggalian	1.410.825,91	1.721.391,20	1.734.586,50	1.868.646,20	2.203.453,30
C	Industri Pengolahan	979.475,74	1.116.020,63	1.246.596,80	1.391.426,30	1.717.341,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.500,39	8.396,76	9.194,38	9.355,18	9.725,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.574,88	6.064,11	5.750,30	6.044,91	6.890,14
F	Konstruksi	417.668,45	447.679,00	510.596,02	557.847,32	650.405,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.796.201,31	2.011.553,68	2.104.704,22	2.286.694,89	2.513.888,45
H	Transportasi dan Pergudangan	285.479,15	292.817,06	316.551,04	352.390,23	415.625,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365.126,96	394.856,73	421.780,36	447.175,46	515.685,80
J	Informasi dan Komunikasi	120.350,14	133.057,35	143.889,40	153.280,11	166.227,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	313.690,63	348.514,72	394.549,82	433.246,02	486.846,28
L	Real Estate	144.182,49	153.856,16	163.772,00	179.074,80	206.964,44
M,N	Jasa Perusahaan	25.413,09	30.003,03	32.945,65	39.092,48	44.499,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.562,86	444.237,24	489.811,79	527.545,25	573.232,85
P	Jasa Pendidikan	405.201,84	547.025,33	712.040,85	837.460,28	971.762,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.299,49	92.149,44	109.795,83	122.087,79	144.177,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	232.736,84	246.707,40	246.878,48	280.199,94	329.946,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		10.149.079,63	11.373.376,27	12.285.562,55	13.544.646,54	15.055.175,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		8.786.056,11	9.717.743,00	10.639.751,77	11.757.236,71	13.006.771,64

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010)
 TAHUN 2010 - 2014 (JUJUAAN RUPIAH)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.133.789,45	3.168.043,04	3.221.615,90	3.301.131,01	3.115.946,41
B	Pertambangan dan Penggalian	1.410.825,91	1.489.240,56	1.576.084,57	1.693.313,79	1.779.359,69
C	Industri Pengolahan	979.475,74	1.007.279,27	1.094.477,09	1.171.962,66	1.341.483,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.500,39	8.334,00	9.214,05	9.931,80	10.251,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.574,88	5.959,74	5.804,48	5.953,47	6.244,62
F	Konstruksi	417.668,45	423.455,92	466.188,22	489.298,12	518.719,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.796.201,31	1.929.342,13	1.984.841,18	2.090.326,81	2.233.698,83
H	Transportasi dan Pergudangan	285.479,15	291.423,92	312.483,06	344.916,24	381.365,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365.126,96	379.441,80	402.046,17	416.432,15	453.923,85
J	Informasi dan Komunikasi	120.350,14	132.131,79	146.309,56	161.629,08	182.696,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	313.690,63	329.282,21	343.743,46	357.982,94	383.015,37
L	Real Estate	144.182,49	153.359,75	162.718,16	175.834,75	191.350,14
M,N	Jasa Perusahaan	25.413,09	28.068,00	30.030,27	34.076,13	37.687,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.562,86	434.085,07	437.056,31	447.597,35	456.716,05
P	Jasa Pendidikan	405.201,84	491.367,76	589.647,99	646.701,86	729.250,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.299,49	86.937,75	95.687,24	102.586,00	115.090,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	232.736,84	239.970,32	238.918,19	262.830,70	290.400,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		10.149.079,63	10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		8.786.056,11	9.160.112,22	9.603.310,46	10.093.016,31	10.540.216,82

Tabel 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2014 (%)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,88	29,71	29,65	29,92	27,22
B	Pertambangan dan Penggalian	13,90	15,14	14,12	13,80	14,64
C	Industri Pengolahan	9,65	9,81	10,15	10,27	11,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
F	Konstruksi	4,12	3,94	4,16	4,12	4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,70	17,69	17,13	16,88	16,70
H	Transportasi dan Pergudangan	2,81	2,57	2,58	2,60	2,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,60	3,47	3,43	3,30	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,17	1,17	1,13	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,09	3,06	3,21	3,20	3,23
L	Real Estate	1,42	1,35	1,33	1,32	1,37
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,20	3,91	3,99	3,89	3,81
P	Jasa Pendidikan	3,99	4,81	5,80	6,18	6,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,81	0,89	0,90	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,29	2,17	2,01	2,07	2,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010) TAHUN 2010 - 2014 (%)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,88	29,89	28,98	28,18	25,48
B	Pertambangan dan Penggalian	13,90	14,05	14,18	14,46	14,55
C	Industri Pengolahan	9,65	9,50	9,85	10,01	10,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	4,12	4,00	4,19	4,18	4,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,70	18,21	17,85	17,85	18,27
H	Transportasi dan Pergudangan	2,81	2,75	2,81	2,94	3,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,60	3,58	3,62	3,56	3,71
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,25	1,32	1,38	1,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,09	3,11	3,09	3,06	3,13
L	Real Estate	1,42	1,45	1,46	1,50	1,56
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,29	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,20	4,10	3,93	3,82	3,74
P	Jasa Pendidikan	3,99	4,64	5,30	5,52	5,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,82	0,86	0,88	0,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,29	2,26	2,15	2,24	2,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2014

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	107,83	107,79	111,28	101,12
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	122,01	100,77	107,73	117,92
C	Industri Pengolahan	100,00	113,94	111,70	111,62	123,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	111,95	109,50	101,75	103,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	108,78	94,83	105,12	113,98
F	Konstruksi	100,00	107,19	114,05	109,25	116,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	111,99	104,63	108,65	109,94
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	102,57	108,11	111,32	117,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	108,14	106,82	106,02	115,32
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	110,56	108,14	106,53	108,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	111,10	113,21	109,81	112,37
L	Real Estate	100,00	106,71	106,44	109,34	115,57
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	118,06	109,81	118,66	113,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	104,14	110,26	107,70	108,66
P	Jasa Pendidikan	100,00	135,00	130,17	117,61	116,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	116,20	119,15	111,20	118,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	106,00	100,07	113,50	117,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	112,06	108,02	110,25	111,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		100,00	110,60	109,49	110,50	110,63

Tabel 6. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2000) TAHUN 2010 - 2014

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	101,09	101,69	102,47	94,39
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	105,56	105,83	107,44	105,08
C	Industri Pengolahan	100,00	102,84	108,66	107,08	114,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	111,11	110,56	107,79	103,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	106,90	97,39	102,57	104,89
F	Konstruksi	100,00	101,39	110,09	104,96	106,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	107,41	102,88	105,31	106,86
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	102,08	107,23	110,38	110,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	103,92	105,96	103,58	109,00
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	109,79	110,73	110,47	113,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	104,97	104,39	104,14	106,99
L	Real Estate	100,00	106,37	106,10	108,06	108,82
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	110,45	106,99	113,47	110,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	101,76	100,68	102,41	102,04
P	Jasa Pendidikan	100,00	121,26	120,00	109,68	112,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	109,63	110,06	107,21	112,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	103,11	99,56	110,01	110,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	104,42	104,90	105,36	104,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		100,00	104,26	104,84	105,10	104,43

Tabel 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2014
 (TAHUN 2010 = 100)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	107,83	116,22	129,33	130,78
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	122,01	122,95	132,45	156,18
C	Industri Pengolahan	100,00	113,94	127,27	142,06	175,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	111,95	122,59	124,73	129,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	108,78	103,15	108,43	123,59
F	Konstruksi	100,00	107,19	122,25	133,56	155,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	111,99	117,18	127,31	139,96
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	102,57	110,88	123,44	145,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	108,14	115,52	122,47	141,23
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	110,56	119,56	127,36	138,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	111,10	125,78	138,11	155,20
L	Real Estate	100,00	106,71	113,59	124,20	143,54
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	118,06	129,64	153,83	175,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	104,14	114,83	123,67	134,38
P	Jasa Pendidikan	100,00	135,00	175,72	206,68	239,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	116,20	138,46	153,96	181,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	106,00	106,08	120,39	141,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	112,06	121,05	133,46	148,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		100,00	110,60	121,10	133,82	148,04

Tabel 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2000) TAHUN 2010 - 2014
 (TAHUN 2010 = 100)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	101,09	102,80	105,34	99,43
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	105,56	111,71	120,02	126,12
C	Industri Pengolahan	100,00	102,84	111,74	119,65	136,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	111,11	122,85	132,42	136,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	106,90	104,12	106,79	112,01
F	Konstruksi	100,00	101,39	111,62	117,15	124,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	107,41	110,50	116,37	124,36
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	102,08	109,46	120,82	133,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	103,92	110,11	114,05	124,32
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	109,79	121,57	134,30	151,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	104,97	109,58	114,12	122,10
L	Real Estate	100,00	106,37	112,86	121,95	132,71
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	110,45	118,17	134,09	148,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	101,76	102,46	104,93	107,07
P	Jasa Pendidikan	100,00	121,26	145,52	159,60	179,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	109,63	120,67	129,37	145,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	103,11	102,66	112,93	124,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	104,42	109,54	115,40	120,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		100,00	104,26	109,30	114,88	119,97

Tabel 9. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2014 (%)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,64	7,83	7,79	11,28	1,12
B	Pertambangan dan Penggalian	22,06	22,01	0,77	7,73	17,92
C	Industri Pengolahan	11,22	13,94	11,70	11,62	23,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,34	11,95	9,50	1,75	3,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,62	8,78	(5,17)	5,12	13,98
F	Konstruksi	12,94	7,19	14,05	9,25	16,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,69	11,99	4,63	8,65	9,94
H	Transportasi dan Pergudangan	11,20	2,57	8,11	11,32	17,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,54	8,14	6,82	6,02	15,32
J	Informasi dan Komunikasi	13,72	10,56	8,14	6,53	8,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,61	11,10	13,21	9,81	12,37
L	Real Estate	14,47	6,71	6,44	9,34	15,57
M,N	Jasa Perusahaan	10,37	18,06	9,81	18,66	13,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,19	4,14	10,26	7,70	8,66
P	Jasa Pendidikan	14,50	35,00	30,17	17,61	16,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,77	16,20	19,15	11,20	18,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,61	6,00	0,07	13,50	17,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		14,46	12,06	8,02	10,25	11,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		13,30	10,60	9,49	10,50	10,63

Tabel 10. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2000) TAHUN 2010 - 2014 (%)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,29	1,09	1,69	2,47	(5,61)
B	Pertambangan dan Penggalian	1,32	5,56	5,83	7,44	5,08
C	Industri Pengolahan	3,70	2,84	8,66	7,08	14,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	11,11	10,56	7,79	3,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,41	6,90	(2,61)	2,57	4,89
F	Konstruksi	6,24	1,39	10,09	4,96	6,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,27	7,41	2,88	5,31	6,86
H	Transportasi dan Pergudangan	5,38	2,08	7,23	10,38	10,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,96	3,92	5,96	3,58	9,00
J	Informasi dan Komunikasi	6,63	9,79	10,73	10,47	13,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,41	4,97	4,39	4,14	6,99
L	Real Estate	5,82	6,37	6,10	8,06	8,82
M,N	Jasa Perusahaan	4,20	10,45	6,99	13,47	10,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,83	1,76	0,68	2,41	2,04
P	Jasa Pendidikan	6,58	21,26	20,00	9,68	12,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,13	9,63	10,06	7,21	12,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,83	3,11	(0,44)	10,01	10,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		5,07	4,42	4,90	5,36	4,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		5,79	4,26	4,84	5,10	4,43

Tabel 11. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN BLORA
TAHUN 2010 - 2014 (%)
(TAHUN 2010 =100)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	106,66	113,05	122,78	131,53
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	115,59	110,06	110,35	123,83
C	Industri Pengolahan	100,00	110,80	113,90	118,73	128,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	100,75	99,79	94,19	94,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	101,75	99,07	101,54	110,34
F	Konstruksi	100,00	105,72	109,53	114,01	125,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	104,26	106,04	109,39	112,54
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,48	101,30	102,17	108,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	104,06	104,91	107,38	113,61
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	100,70	98,35	94,83	90,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	105,84	114,78	121,02	127,11
L	Real Estate	100,00	100,32	100,65	101,84	108,16
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	106,89	109,71	114,72	118,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	102,34	112,07	117,86	125,51
P	Jasa Pendidikan	100,00	111,33	120,76	129,50	133,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	105,99	114,74	119,01	125,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	102,81	103,33	106,61	113,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	107,32	110,51	115,64	123,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		100,00	106,09	110,79	116,49	123,40

Tabel 12. LAJU IMPLISIT PDRB KABUPATEN BLORA
TAHUN 2010-2014 (%)

KATEGORI	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,98	6,66	5,99	8,60	7,13
B	Pertambangan dan Penggalian	20,47	15,59	(4,79)	0,27	12,21
C	Industri Pengolahan	7,25	10,80	2,80	4,24	7,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,18	0,75	(0,96)	(5,60)	0,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,85	1,75	(2,64)	2,49	8,67
F	Konstruksi	6,31	5,72	3,60	4,09	9,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,87	4,26	1,71	3,16	2,88
H	Transportasi dan Pergudangan	5,52	0,48	0,82	0,85	6,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,22	4,06	0,81	2,36	5,80
J	Informasi dan Komunikasi	6,65	0,70	(2,34)	(3,57)	(4,06)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,84	5,84	8,45	5,44	5,03
L	Real Estate	8,17	0,32	0,32	1,19	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	5,93	6,89	2,63	4,57	2,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,76	2,34	9,51	5,17	6,49
P	Jasa Pendidikan	7,43	11,33	8,47	7,24	2,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,08	5,99	8,25	3,72	5,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,52	2,81	0,51	3,17	6,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		8,93	7,32	2,98	4,64	6,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		7,10	6,09	4,43	5,14	5,93

Tabel 13. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2014

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
1	3	4	5	6	7
PDRB KABUPATEN BLORA DGN MINYAK(Juta Rupiah)	10.149.079,63	11.373.376,27	12.285.562,55	13.544.646,54	15.055.175,26
PDRB KABUPATEN BLORA TANPA MINYAK(Juta Rupiah)	8.786.056,11	9.717.743,00	10.639.751,77	11.757.236,71	13.006.771,64
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	826.851	832.754	837.993	842.325	846.407
<i>PDRB PER KAPITA DGN MINYAK(Rupiah)</i>	12.274.375,47	13.755.049,30	14.858.254,45	16.381.000,38	18.207.845,51
<i>PDRB PER KAPITA TANPA MINYAK(Rupiah)</i>	10.625.924,27	11.752.713,60	12.867.798,16	14.219.293,09	15.730.490,30
	5.102,00	5.903,00	5.239,00	4.332,00	4.081,50

Tabel 14. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2010 - 2014

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
1	3	4	5	6	7
PDRB KABUPATEN BLORA DGN MINYAK(Juta Rupiah)	10.149.079,63	10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29
PDRB KABUPATEN BLORA TANPA MINYAK(Juta Rupiah)	8.786.056,11	9.160.112,22	9.603.310,46	10.093.016,31	10.540.216,82
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	826.851	832.754	837.993	842.325	846.407
<i>PDRB PER KAPITA DGN MINYAK(Rupiah)</i>	12.274.375,47	12.816.968,25	13.444.823,68	14.165.194,03	14.787.671,89
<i>PDRB PER KAPITA TANPA MINYAK(Rupiah)</i>	10.625.924,27	11.078.310,63	11.614.318,00	12.206.572,06	12.747.419,81



LAMPIRAN

<https://blorakab.bps.go.id>
<http://blorakab.bps.go.id>



Tabel : 15 PDRB Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 - 2014 (Jutaan Rupiah)

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	4.544.615,36	5.100.437,62	5.376.705,61	5.921.725,57	6.301.958,00
2. Sektor Sekunder	1.410.219,47	1.578.160,50	1.772.137,50	1.964.673,71	2.384.361,71
3. Sektor Tersier	4.194.244,80	4.694.778,14	5.136.719,44	5.658.247,26	6.368.855,55
Total PDRB	10.149.079,63	11.373.376,27	12.285.562,55	13.544.646,54	15.055.175,26
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	4.544.615,36	4.657.283,60	4.797.700,47	4.994.444,80	4.895.306,11
2. Sektor Sekunder	1.410.219,47	1.445.028,93	1.575.683,84	1.677.146,05	1.876.698,96
3. Sektor Tersier	4.194.244,80	4.495.410,48	4.743.481,59	5.040.914,00	5.455.196,22
Total PDRB	10.149.079,63	10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29

Tabel : 16 Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Blora
 Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 - 2014
 (Persen)

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	44,78	44,85	43,76	43,72	41,86
2. Sektor Sekunder	13,90	13,88	14,42	14,51	15,84
3. Sektor Tersier	41,33	41,28	41,81	41,77	42,30
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	44,78	43,95	43,16	42,64	40,04
2. Sektor Sekunder	13,90	13,64	14,17	14,32	15,35
3. Sektor Tersier	41,33	42,42	42,67	43,04	44,62
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel : 17 Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora
 Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 - 2014
 (Tahun 2000 = 100,00)

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	100,00	112,23	118,31	130,30	138,67
2. Sektor Sekunder	100,00	111,91	125,66	139,32	169,08
3. Sektor Tersier	100,00	111,93	122,47	134,91	151,85
Total PDRB	100,00	112,06	121,05	133,46	148,34
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	100,00	102,48	105,57	109,90	107,72
2. Sektor Sekunder	100,00	102,47	111,73	118,93	133,08
3. Sektor Tersier	100,00	107,18	113,10	120,19	130,06
Total PDRB	100,00	104,42	109,54	115,40	120,48

Tabel : 18 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora
 Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 - 2014
 (Tahun sebelumnya = 100,00)

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	100,00	112,23	105,42	110,14	106,42
2. Sektor Sekunder	100,00	111,91	112,29	110,86	121,36
3. Sektor Tersier	100,00	111,93	109,41	110,15	112,56
Total PDRB	100,00	112,06	108,02	110,25	111,15
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	100,00	102,48	103,01	104,10	98,02
2. Sektor Sekunder	100,00	102,47	109,04	106,44	111,90
3. Sektor Tersier	100,00	107,18	105,52	106,27	108,22
Total PDRB	100,00	104,42	104,90	105,36	104,39

Tabel : 19 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora
Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010 - 2014
(Persen)

Rincian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	15,41	12,23	5,42	10,14	6,42
2. Sektor Sekunder	11,75	11,91	12,29	10,86	21,36
3. Sektor Tersier	14,38	11,93	9,41	10,15	12,56
Total PDRB	14,46	12,06	8,02	10,25	11,15
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	4,02	2,48	3,01	4,10	-1,98
2. Sektor Sekunder	4,47	2,47	9,04	6,44	11,90
3. Sektor Tersier	6,44	7,18	5,52	6,27	8,22
Total PDRB	5,07	4,42	4,90	5,36	4,39

DATA MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BLORA

Jalan Rajawali No. 12 Blora Telp/Fax (0296) 531191
email : bps3316@bps.go.id website : blorakab@bps.go.id

ISBN : 978-602-71146-8-6



9 786027 114685